

AG NO : 712
TGL TERIMA : 10-03-17
PARAF : 4



**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
(Studi Kasus pada DPPKA Kabupaten Tanah Datar)**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Syariah
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

Oleh:

PUTRI AULY
NIM. 12 231 011

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH KONSENTRASI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
1438 H/2017 M**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Auly
NIM : 12 231 011
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Rumbai, 11 September 1993
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR (Studi Kasus pada DPPKA Kabupaten Tanah Datar)”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Februari 2017
Saya yang Menyatakan



Putri Auly
NIM. 12 231 011

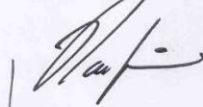
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **PUTRI AULY NIM 12 231 011** Judul: **“ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR (Studi Kasus Pada DPPKA Kabupaten Tanah Datar) “**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan pada sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 16 Februari 2017

Pembimbing I



Nasfizar Guspendri, SE.,M.Si
Nip. 19750823 200312 1 004

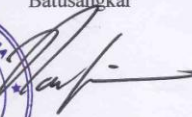
Pembimbing II



Desy Farina, SE., M. Si.
NIP -

Mengetahui:





Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar



Nasfizar Guspendri, SE.,M.Si
NIP 19750823 200312 1 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh PUTRI AULY, NIM. 12 231 011, judul: "ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR (Studi Kasus pada DPPKA Kabupaten Tanah Datar)", telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan pada Jum'at tanggal 24 Februari 2017 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Nasfizar Guspendri, SE., M.Si NIP. 19750823 200312 1 004	Ketua Sidang		
2	Desy Farina, SE., M.Si NIP. -	Sekretaris Sidang		9/3 2017
3	Gampito, SE., M.Si NIP. 19670219 200501 1 005	Anggota I		8/3-17
4	Elfina Yenti, SE, Akt, M.Si, CA NIP. 19740623 200003 2 002	Anggota II		7/2 2017

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar



Nasfizar Guspendri, SE., M.Si
NIP. 19750823 200312 1 004

Kata Persembahan



*Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan Tuhanmulah
yang mahla mulia. Yang mengajar manusia dengan pena, Dia mengajarkan manusia apa yang
tidak diketahuinya (QS: Al-'Alaq 1-5)
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ? (QS: Ar-Rahman 13)
Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan
orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat (QS : Al-Mujadilah 11)
Cukuplah Allah bagi kami dan Dialah Sebaik-baik Pengurus (QS: Ali Imran 173)*

Ya Allah ...

*Waktu yang sudah ku jalani dengan jalan hidup yang sudah
menjadi takdirku, sedih, bahagia, dan bertemu orang-orang yang
memberiku sejuta pengalaman, yang telah memberi warna-warni
kehidupanku. Kubersujud dihadapan-Mu, Engkau berikan aku
kesempatan untuk bisa sampai dipenghujung awal perjuanganku Segala
Puji bagi Mu ya Allah,*

*Alhamdulillah.. Alhamdulillah.. Alhamdulillahirobbil'alamin..
Sujud syukurku kepada-Mu ya Allah yang Maha Agung, yang Maha
Tinggi yang Maha Adil dan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau
jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, dan bersabar
dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu
langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita yang ku impikan. Lantunan
Al-fatihah beriring Shalawat dalam silahku merintih, menadahkan doa
dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untuk-Mu Ya Allah....*

Ayah dan Ibu Tercinta...

*Ku persembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan
Ibundaku tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku
semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan
yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan
yang ada di depanku. Ayah, Ibu... terimalah bukti kecil ini sebagai kado
keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu.. dalam hidupmu
demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal
lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya.. Maafkan
anakmu Ayah,, Ibu,, masih saja ananda menyusahkanmu..*

*Dalam silah di lima waktu mulai fajar terbit hingga terbenam..
seraya tangaku menadah".. ya Allah ya Rahman ya Rahim...
Terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang*

setiap waktu ikhlas menjagaku, mendidikku, membimbingku dengan baik... ya Allah berikanlah balasan setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat hawa api nerakamu..

Untuk Almarhum Ayah (Armen Laut),,, Ibu (Suryati)...Terimakasih....
we always loving you... (Anakmu)

Uda Kanduang Sibirang Tulang...

Dalam setiap langkah, aku berusaha mewujudkan untaian harapan yang kalian impikan di diriku, meski belum semua itu kuraih' Inshaa allah atas dukungan doa dan restu semua mimpi itu akan terjawab di masa penuh kehangatan nanti. Untuk itu kupersembahkan ungkapan terimakasihku kepada: Kepada abangku (Da Rufal Mitra dan Da Ruspiko) dan Kakak Iparku yang baik hati (Chorisna S.pd)

Da... Adekmu yang paling nakal ini bisa wisuda juga kan.. (^,^)
Makasih yaaa buat segala dukungan doa dan khususnya makasih buat sering-sering transferannya.. hehehe...

I love you all...

Keluarga Besar

Makasih banyak untuak Mamak, Etek, Uda dan Uni-uni (Da Andi, Ni Yance, Ni Del, Ni Jus, Ni As, Ni Anis, Da Cau, Da feri, Tek War, Tek Ma, Ni Dila, Ni Rini, Da Al, Da Jis, Da Is, Ni Nur, Ni Sel, Da Jas, Tek Jus, Mak Imen, Mak Ujang, Angku Abas, Angku Icap) atas bantuan secara materil selama Riri di jenjang pendidikan...

To Kepompong...

Hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri
Tanpa melibatkan bantuan Tuhan dan orang lain.

"Tak ada tempat terbaik untuk berkeluh kesah selain bersama sahabat-sahabat terbaik"...

Terimakasih ku ucapkan Kepada Sahabat terbaikku, Saudara seperjuangan, "Tanpamu teman aku tak pernah berarti,, tanpamu teman aku bukan siapa-siapa yang takkan jadi apa-apa", untuak Konco arek wak dari SMA (Jenatun, My sista Devi, Neola, Cindy) trus untuak Uniang Darniati, adiak feratun dan ipik, apo kabanyo sobat,, suka cita ampek satangah tahun wak lalui basamo,, mokasih banyak sobat salamo ko lah nio jadi kawan Ri, untuak uniang jo adiak kejar target wisudamu dan tetap fokus, kini hanya doa nan dapek Ri bantu, semoga sukses !,. tarimo kasih selalu memotivasi Ri buek skripsi ko, tetap semangat sobat,, aku yakin dan sangat sangat yakin Uniang n adiak paaaaaassstttiii bissaaaaa !!

Jangan cepat menyerah apapun yang terjadi, tetap melangkah meski itu sulit'. Letakkan bayangan toga di depan alis matamu, target 5cm itu pasti di raih!!, Buat sobatku...

Brother2 Kece Badai...

Makasih banyak yo senior Muhammad Haris Rifqi... tiap komunikasi selalu buek lawak... makasih ala buek ri galak... dan makasih banyak lo yo senior ala namuah sharing2 ilmunyo...
Makasih Mas Broo defri yang hobi Touring....
Makasih Bg Fani... yang selalu memotivasi Ri...
Thank You Very Much...

Aksya bp 2012

Makasih banyak untuak kawan-kawan Aksya A khususnya yang ala namuah berbagi ilmunyo, pengalamannyo samo Ri... maaf indak bisa sabuik'an namonyo ciek-ciek... hehehe, untuak Aksya B baitu pulo... mudah2an silaturrahmi kito tajago hendaknyo... dan ciek lai untuak kawan2 seperjuangan manyusun skripsi (Ade, Afdal, Ifri, Sucy Jewel, Riskha, Resti, Desi, Hilfa, Yori, Indah, Yesi, Zizi, One, Dewi, KD, Nuril, Reza, Bg Rezi, Panji, Riwan) makasih banyak atas bantuannyo salamo proses penyusunan skripsi...

Keluarga Besar Tapak Suci Putera Muhammadiyah Pimda 140 Kab. Tanah Datar

Makasih banyak untuak Pendekar Kito, Bapak Chardinal Putra, makasih banyak yo pak atas motivasi dan ilmu yang apak bagi ka Ri salamo ko pak khususnya ilmu Bela Diri...
Makasih banyak untuak Pelatih Ganteng awak Frendri Prananta, M.pd n kak Sari... maksih yo bg, akak atas motivasinyo salamo ko...
Trus untuak brother awak Heru Yama Putra, bg Angga Saputra, bg Riandi, bg Robi, bg Adam n Cimomon, Ucok, Zikri yang ala memotivasi ri salamo ko..
Selanjutnyo untuak anak-anak amak kasadonyo (Yenny Puspita, Febby, Peppi, Fitri, Iyul, Uul, Wulan, Mira, Filda, Meri, Ijah, Atik, Fadli, n yang bungsu Riski) makasih yo nak ala malawak c taruih...

Keluarga Besar UKM Riset dan Karya Tulis

Makasih banyak buat Pembina Rkt dan Kawan2 n adek2 (Ilham, Afril Farfan, Rahmi, Mega, Bedria, Zahratul) yang udah mau berbagi ilmu khususnya dibidang tulis menulis... yang tadinya sekedar suka nulis sekarang udah hobi beneran...

Keluarga Besar IMSOS

Makasih banyak untuak saudara sakampuang... makasih yo abg2, kakak2, n adek2 kasadonyo...

Kawan2 KKN

Makasih banyak Ketua Riki Forniko... n anak2 Ummi (Ica, Wira, Fitri, Nana, Wahida, Ucy n Babay) Makasih atas kebaikannya selama ini..

*Kalian semua bukan hanya menjadi teman dan adik yang baik,
kalian adalah saudara bagiku!!*

*Nb: Mohon maaf atas segala keterbatasan, mohon maaf atas nama-nama rekan yang tak
tertulis di sini, tapi doa dan ucapan terima kasih senantiasa mengalir membasahi
lisan ini... Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian...*

Aamiin Ya Rabbalalamin....



Salam Penulis

Putri Auly, SE

ABSTRAK

Nama **Putri Auly**, NIM **12 231 011**, Judul Skripsi “**Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Reklame serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar**”, Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi **Akuntansi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Reklame serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Reklame serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan mengacu pada teori dan rumus efektivitas, efisiensi dan kontribusi.

Efektivitas pemungutan pajak reklame Kabupaten Tanah Datar yang termasuk kategori sangat efektif terjadi pada tahun 2015 dengan persentase sebesar 101,63%. Kemudian yang termasuk kategori cukup efektif terjadi pada tahun 2012 dengan persentase sebesar 89,11%, selanjutnya yang termasuk kategori tidak efektif terjadi pada tahun 2011, 2013 dan 2014 dengan persentase berturut-turut sebesar 36,91%, 57,05%, 49,77%.

Selanjutnya, dapat diketahui efisiensi pemungutan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2011 hingga tahun 2015 tergolong ke dalam skala Sangat Efisien, dan persentasenya berturut-turut adalah 0,630%, 1,094%, 1,046%, 0,837%, 0,644%.

Terakhir, dapat diketahui kontribusi pemungutan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2011 sampai tahun 2015 tergolong ke dalam skala sangat kurang berkontribusi dan persentasenya berturut-turut adalah 0,071%, 0,189%, 0,010%, 0,012%, 0,116%.

Kata Kunci : *Efektivitas dan Efisiensi Pajak Reklame, Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji, Kehormatan, Keagungan, Kemuliaan hanya milik Allah SWT yang telah mencurahkan Taufik, Hidayah, Rahman dan Rahim-Nya, sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul **“ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR (Studi Kasus pada DPPKA Kabupaten Tanah Datar)”**. Shalawat dan Salam penulis memohon kepada Allah SWT untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang penulis rasakan sekarang ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Penyusunan skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada Ibunda (Suryati), Abang-abangku (Rufal Mitra dan Ruspiko) dan Kakak Iparku (Chorisna S.pd) yang telah memberikan doa, motivasi dan dukungan moril maupun materil untuk selesainya penulisan ini. Dan penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Batusangkar yaitu Bapak Dr. H. Kasmuri, M.A.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yaitu Bapak Nasfizar Guspendri, S.E., M.Si beserta jajarannya.
3. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Bapak Gampito, S.E., M.Si,
4. Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing I Bapak Nasfizar Guspendri, S.E., M.Si yang telah memberikan nasehat dan arahan selama penyusunan

skripsi serta dukungannya dari awal sampai akhir perjuangan saya di IAIN Batusangkar.

5. Pembimbing II yaitu Ibu Desy Farina, SE., M.Si yang telah begitu banyak membantu, membimbing dan mengarahkan Penulis selama penyusunan skripsi.
6. Penguji I Bapak Gampito, SE., M.Si yang telah mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi.
7. Penguji II Ibu Elfina Yenti, SE., Akt., M.Si., CA yang telah mengarahkan penulis selama penulisan skripsi.
8. Seluruh dosen dan staff administrasi IAIN Batusangkar yang menaruh perhatian dan bantuan kepada Penulis sehingga selesainya skripsi ini.
9. Bapak Kepala Perpustakaan beserta Staf Perpustakaan IAIN Batusangkar, yang telah menyediakan fasilitas berupa buku-buku dan internet yang penulis butuhkan.
10. Semua pegawai Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar khususnya Bapak Yorry Irawan, SE dan Kakak Anike Deswira, SE yang telah membantu penulis dalam memberikan data dan membuat surat penelitian guna untuk menyempurnakan skripsi ini.

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain iringan doa dan harapan semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil. Kiranya karya ini memberikan sumbangsih bagi para pembaca dan pemerhati serta menjadi amal sholeh bagi Penulis. Amin...

Penulis mohon maaf, jika dalam skripsi ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan, baik teknis maupun isinya. Kritik yang konstruktif dan sehat sangat Penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Batusangkar, 12 Februari 2017

Penulis,


Putri Auly

NIM. 12 231 011

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Masalah.....	8
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORITIK	
A. Konsep Pajak.....	10
1. Pengertian Pajak.....	10
2. Fungsi Pajak	11
3. Syarat Pemungutan Pajak.....	11
4. Dasar Hukum Pajak.....	12
5. Sistem Pemungutan Pajak	13
6. Pengelompokkan Pajak	14
B. Pajak Daerah	16
1. Pengertian Pajak Daerah	16
2. Pengklasifikasian Pajak Daerah	16
3. Peranan Pajak Daerah dalam Mendukung Pembiayaan Daerah	17

C. Pajak Reklame.....	20
1. Pengertian Pemungutan Pajak Reklame	20
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame	21
3. Obyek dan Bukan Obyek Pajak Reklame	21
4. Subyek dan Wajib Pajak Reklame	22
5. Dasar Pengenaan, Tarif, Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame	23
D. Akuntansi Pemerintah	27
E. Pendapatan Asli Daerah	29
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	29
2. Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah	30
F. Analisis Efektivitas, Efisiensi serta Kontribusi.....	32
1. Analisis Deskriptif	32
2. Efektivitas Pajak.....	33
3. Efisiensi Pajak.....	34
4. Kontribusi Pajak.....	35
G. Penelitian yang Relevan	36
H. Kerangka Berpikir	39

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	41
B. Waktu dan Tempat Penelitian	41
C. Metode Penelitian.....	41
D. Metode Pengumpulan Data	42
E. Metode Analisis Data.....	42
1. Analisis Deskriptif Data.....	42
2. Analisis Efektivitas	43
3. Analisis Efisiensi.....	44
4. Analisis Kontribusi	45

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Berdirinya DPPKA Kabupaten Tanah Datar	47
---	----

B. Tugas Pokok dan Fungsi DPPKA Kabupaten Tanah Datar.....	48
C. Visi dan Misi DPPKA Kabupaten Tanah Datar.....	49
D. Struktur Organisasi dan Susunan Organisasi DPPKA Kabupaten Tanah Datar.....	50
E. Kegiatan Utama DPPKA Kabupaten Tanah Datar	54
F. Pergedungan dan Penataan Ruang DPPKA Kabupaten Tanah Datar.....	59
G. Analisis dan Pembahasan.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL

Hal

1.1 Target dan Realisasi Pemungutan Pajak Reklame	5
2.1 Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR).....	24
2.2 Nilai Strategis Pemasangan Reklame.....	26
2.3 Tingkat Mengukur Efektivitas Keuangan Daerah.....	34
2.4 Tingkat Efisiensi terhadap Pajak Daerah	35
2.5 Tingkat Kontribusi Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah	36
3.1 Tingkat Mengukur Efektivitas Keuangan Daerah.....	44
3.2 Tingkat Efisiensi terhadap Pajak Daerah	45
3.3 Tingkat Kontribusi Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah	46
4.1 Hasil Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame Kabupaten Tanah Datar.....	62
4.2 Realisasi Penerimaan pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar	64
4.3 Target dan Realisasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah	67
4.4 Biaya Pemungutan Pajak Reklame	68
4.5 Efisiensi Pemungutan Pajak Reklame Kabupaten Tanah Datar	69
4.6 Kontribusi Pemungutan Pajak Reklame Kabupaten Tanah Datar	72

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

Hal

2.6 Kerangka Berpikir	40
4.1 Struktur Organisasi DPPKA Kabupaten Tanah Datar	53

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Izin Penelitian dari P2M IAIN Batusangkar
2. Surat Keterangan dari Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar
3. Surat Keterangan dari DPPKA Kabupaten Tanah Datar
4. Daftar Target dan Realisasi PAD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011
5. Daftar Target dan Realisasi PAD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012
6. Daftar Target dan Realisasi PAD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013
7. Daftar Target dan Realisasi PAD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014
8. Daftar Target dan Realisasi PAD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015
9. Realisasi Keuangan Tahun 2011
10. Realisasi Keuangan Tahun 2012
11. Realisasi Keuangan Tahun 2013
12. Realisasi Keuangan Tahun 2014
13. Realisasi Keuangan Tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 butir 1 defenisi pajak, yaitu: “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”¹

Sedangkan menurut syariat islam, pajak adalah beban tambahan yang ditimpakan kepada kaum Muslim setelah adanya beban pertama, yaitu zakat.² Sebagaimana hadist yang diriwayatkan Fatimah binti Qais³:

قَالَتْ سَأَلْتُ أَوْ سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِنَّ
فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

Nabi ditanya tentang zakat, maka ia bersabda:” *Sesungguhnya pada harta itu ada kewajiban selain zakat*”.

(Matan lain: Ibnu Majah 1779 Darimi 1581)

Hadist diatas menjelaskan bahwa yang merupakan kewajiban selain zakat yaitu kewajiban sosial lainnya yaitu dapat berupa pajak, sedekah sunnah, infak, hibah, dan juga waqaf. Islam mengajarkan agar tidak saja menunaikan zakat yang terbatas jumlah pemanfaatannya, tetapi juga menganjurkan membayar pajar, menunaikan sedekah sunnah, hibah dan juga infak yang tak terbatas jumlahnya sesuai kemampuan yang dimiliki, dan pemanfaatannya pun juga sangat luas dan fleksibel.

¹Rudy Suhartono, Wirawan B.Ilyas, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakn (KUP)*,(Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal. 2.

² Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat- Edisi Revisi*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal.30

³ Ilfi Nur Diana, *Hadist-hadist Ekonomi*, (Malang:UIN Maliki Press, 2012), hal.96

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara, yang mana pajak itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari peran serta masyarakat dalam rangka pembiayaan rutin Pemerintah dan pembangunan secara gotong royong, sehingga pajak mempunyai kedudukan yang strategis dalam penerimaan Negara.

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak Negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPn BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, dan Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.⁴

Pemerintah Daerah dituntut lebih mandiri dalam mengatur pemerintahannya seperti mengatur strategi pertumbuhan dan pembangunannya masing-masing, serta melihat sektor potensi yang memiliki keunggulan dan kelemahan. Sehingga Pemerintah Daerah akan mengetahui sektor mana yang akan dikembangkan untuk menjadi sektor basis yang akan membantu pengembangan sektor-sektor lainnya sehingga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan neraca keuangan akan mengalami keseimbangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Pendapatan Asli Daerah dihasilkan dari upaya Daerah sendiri yang

⁴Mardiasmo, *Perpajakan: Edisi Revisi Tahun 2011*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011), hal.11-13.

berasal dari berbagai sumber, antara lain adalah dari pajak daerah, retribusi, hasil keuntungan perusahaan daerah dan dari berbagai hasil usaha lainnya yang sah menurut peraturan.⁵

Sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil tetapi juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digali dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi daerah. Dari berbagai alternatif penerimaan Daerah, Undang-undang tentang penerimaan daerah dan juga tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, menetapkan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari dalam Daerah itu sendiri. Sektor pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat potensial.⁶

Kabupaten Tanah Datar atau disebut juga dengan Luhak Nan Tuo yang dikenal dengan kota budaya karena di Luhak Nan Tuo inilah asal muasal minang kabau terbentuk. Hal inilah yang menunjang banyak masyarakat yang melakukan kegiatan bisnis secara produktif, dikarenakan banyaknya wisatawan yang keluar masuk untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Tanah Datar, salah satunya Istana Basa Pagaruyung. Banyaknya kegiatan bisnis yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Tanah Datar membuat Daerah ini ramai akan banyaknya penggunaan reklame. Reklame digunakan sebagai alat untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk – produk oleh pengusaha kepada masyarakat. Banyaknya penggunaan reklame yang terpasang membuat pajak reklame memiliki potensi dalam menyumbang peningkatan PAD Kabupaten Tanah Datar.

⁵Faisal Basri, et. al, *Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian dan Renungan terhadap Masalah-Masalah Struktural, Transformasi Baru dan Prospek Perekonomian Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2009), hal. 458.

⁶Triski Intan Meylani Lengkong, et. al, “Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame di Kota Bitung”, *Jurnal Berkal Ilmiah Efisiensi*, Vol.15 No. 04, (2015), hal.90.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pemungutan pajak reklame di Kabupaten Tanah Datar telah memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait lainnya. Pihak yang menjadi potensi pengguna reklame adalah pelaku bisnis atau pengusaha.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam pasal 1, ayat (23-24) dijelaskan bahwa salah satu jenis Pajak Daerah yang ada di Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar adalah Pajak Reklame. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum.⁷

Adanya peningkatan pada sektor industri, perdagangan dan jasa yang disebabkan oleh fasilitas tersebut maka wadah untuk pemasaran produk pun semakin banyak dibutuhkan, tidak hanya lewat media cetak, media elektronik juga semakin marak dibutuhkan. Lahirnya media baik cetak maupun elektronik, dijadikan sebagai modal besar untuk para pengguna sektor perdagangan, salah satu yang paling diminati adalah pemasaran lewat media reklame. Media reklame dianggap sebagai alternatif pemasaran yang menguntungkan dan sangat efektif. Reklame dianggap mampu menarik calon konsumen karena reklame bisa diakses oleh semua pihak. Hal ini menjadikan reklame sebagai salah satu potensi dan perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah, baik dalam hal pemberian aturan dan tarif pemasangan reklame yang diatur oleh undang-undang maupun Peraturan Daerah.⁸

⁷Peraturan Daerah Kab Tanah Datar, Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 1 ayat (23-24)

⁸Triski Intan Meylani Lengkong, et. al, "Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame di Kota Bitung", *Jurnal Berkal Ilmiah Efisiensi*, Vol.15 No. 04, (2015), hal.90.

Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar, target dan realisasi pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Tanah Datar periode 2011-2015 menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Hal ini dapat di lihat dari tabel Target dan Realisasi Pemungutan Pajak Reklame Kabupaten Tanah Datar dibawah ini:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pemungutan Pajak Reklame
Kabupaten Tanah Datar
Periode 2011-2015
(Dalam Rupiah)

No	Tahun	Target	Realisasi
1.	2011	116.770.376,40	43.098.445,00
2.	2012	127.583.985,00	113.693.571,00
3.	2013	162.625.830,00	92.771.504,00
4.	2014	248.252.410,00	123.563.728,00
5.	2015	128.139.565,00	130.227.364,00

Sumber: DPPKA (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset) Kabupaten Tanah Datar (Data yang diolah).

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi pemungutan Pajak Reklame tidak mencapai target anggaran dari tahun 2011-2014, Sedangkan pada tahun 2015 realisasi pemungutan Pajak Reklame mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan.

Banyak faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target dari pajak reklame Kabupaten Tanah Datar, terutama pada objek pajak reklame. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pada Pasal 18 ayat (1-2) dibahas mengenai Objek Pajak Reklame di Kabupaten Tanah Datar dan yang merupakan objek pajak reklame yaitu semua penyelenggaraan reklame seperti:

1. Reklame Papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya.
2. Reklame Kain.
3. Reklame Melekat, stiker.

4. Reklame Selebaran.
5. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan.
6. Reklame Udara.
7. Reklame Apung.
8. Reklame Suara.
9. Reklame Film/*slide*, dan
10. Reklame Peragaan.⁹

Dari sekian jenis objek pajak reklame yang ditetapkan. Namun, fenomena yang terjadi dilapangan masih sangat jauh dari kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, pemungutan pajak reklame dari tahun 2011-2015 hanya bersumber dari reklame papan (sejenisnya) dan reklame kain, sedangkan reklame melekat, stiker, reklame selebaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan belum tercapai pemungutannya walaupun sudah ditargetkan anggarannya. Hal tersebut terjadi dikarenakan masih sangat kurangnya kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk membayar kewajibannya. sedangkan reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film, reklame peragaan memang belum digunakan oleh wajib pajak.¹⁰

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap Pajak Reklame yang dikenakan wajib pajak di Kabupaten Tanah Datar dengan judul **“Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Reklame serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah yang muncul dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pemungutan Pajak Reklame Kabupaten Tanah Datar periode 2011-2015?

⁹Peraturan Daerah...pasal 18 ayat (1-2)

¹⁰ Azwardi (Seksi Data Legalisasi dan Pengkajian Pendapatan), *Hasil Wawancara*, tanggal 18 Oktober 2016.

2. Bagaimana efisiensi pemungutan Pajak Reklame Kabupaten Tanah Datar periode 2011-2015?
3. Bagaimana kontribusi pemungutan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar periode 2011-2015?
4. Bagaimana perkembangan Pajak Reklame Kabupaten Tanah Datar setiap tahunnya?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pemungutan Pajak Reklame Kabupaten Tanah Datar periode 2011-2015 ?
2. Bagaimana efisiensi pemungutan Pajak Reklame Kabupaten Tanah Datar periode 2011-2015?
3. Bagaimana kontribusi pemungutan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar periode 2011-2015?

D. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak reklame yang dipungut oleh DPPKA (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset) Kabupaten Tanah Datar serta bagaimana kontribusi pemungutan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar pada periode 2011-2015?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame Kabupaten Tanah Datar pada periode 2011-2015.

2. Mengetahui tingkat Efisiensi Pemungutan Pajak Reklame Kabupaten Tanah Datar pada periode 2011-2015.
3. Mengetahui Kontribusi Pemungutan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar pada periode 2011-2015.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Penulis

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan penulis dalam memahami analisis efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak reklame serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di Kabupaten Tanah Datar pada periode 2011-2015. Selain itu penelitian ini menjadi salah satu sarana bagi penulis untuk dapat mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu yang selama ini penulis peroleh dari bangku perkuliahan.

2. Bagi Akademisi

- a. Salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Syariah pada Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi mengenai analisis efektivitas dan efisiensi pemungutan Pajak Reklame serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar periode 2011-2015.

3. Bagi Dinas/ Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk mengetahui analisis efektivitas dan efisiensi pemungutan Pajak Reklame serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar pada periode 2011-2015.

BAB II
LANDASAN TEORITIK

A. Konsep Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya dipergunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.” Sedangkan menurut Prof.Dr.P.J.A.Andriani menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹¹

Dengan Demikian, bagi Negara pajak merupakan penerimaan yang strategis untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara dan sekaligus sebagai kebersamaan sosial (asas gotong royong) untuk ikut bersama-sama memikul pembiayaan Negara.

Hal ini terlihat secara nyata, kontribusi pajak didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terlihat meningkat setiap tahun. Bagi Wajib Pajak yang berbentuk perusahaan, pajak dapat dikategorikan sebagai beban, yang akan mengurangi laba bersih. Begitu juga dengan orang pribadi, pajak jika dilihat dalam perspektif yang sempit akan mengurangi tingkat kesejahteraan, karena semakin tinggi pajak, berarti semakin kecil pula kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat privat. Sedangkan jika dilihat dalam perspektif yang lebih luas, dengan semakin besarnya pajak, maka kemampuan Negara untuk menyediakan barang-barang publik juga semakin besar, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

¹¹ Dwiarso Utomo, et al, *Perpajakan Aplikasi dan Terapannya*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011), hal.1-2.

Dengan kata lain pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor pusat ke sektor publik. Akibatnya dari pemindahan sumber daya tersebut, akan mempengaruhi arus dana, daya beli dan kemampuan belanja sektor privat. Oleh karena itu, pajak dipungut dari rakyat dan membebankan rakyat, maka harus mendapatkan persetujuan dari rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seperti yang dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa segala pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.¹²

2. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.¹³

3. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan

¹²Rudy Suhartono, Wirawan B.Ilyas, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal. 3.

¹³Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2011), hal. 1-2.

dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai dengan budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari pemungutannya.

- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.¹⁴

4. Dasar Hukum Pajak

Sebagai dasar hukum pajak sebagaimana tersebut dalam Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang”.

Pasal ini secara konstitusional merupakan dasar dari sistem pemungutan pajak di Indonesia, sehingga pemungutan pajak di Indonesia mempunyai dasar hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi Negara maupun warganya.¹⁵

5. Sistem Pemungutan Pajak

¹⁴Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011*,..., hal. 2.

¹⁵Eny Kustiyah, Suryani “Efektivitas Pajak Reklame terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta”, *Jurnal Paradigma*, Vol. 12, No. 02, (Agustus 2014 – Januari 2015), hal. 219.

Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan besarnya penetapan pajak, yaitu sebagai berikut:

a. Official Assessment System

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat Pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Cirinya-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.¹⁶

6. Pengelompokkan Pajak

¹⁶Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011...*, hal. 7.

Menurut Supramono dan Damayanti (dalam Aldo) menyatakan bahwa pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

a. Menurut Golongan

1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak langsung karena pengenaan pajaknya adalah langsung kepada Wajib Pajak yang menerima penghasilan, tidak dapat dilimpahkan kepada Wajib Pajak lain.

2) Pajak Tak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seharusnya adalah penjualnya.

b. Menurut Sifat

1) Pajak Subyektif

Pajak yang didasarkan atas keadaan subyeknya, memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya (memperhatikan keadaan Wajib Pajak). Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak subyektif karena pengenaan PPh memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang menerima penghasilan.

2) Pajak Obyektif

Pajak Obyektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan diri Wajib Pajak. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PPN merupakan peningkatan nilai dari suatu barang, bukan penjual yang meningkatkan nilai barang. PBB dikenakan terhadap keadaan dari tanah dan bangunan, bukan dari keadaan pemilikinya.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

1) Pajak Pusat (Negara)

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), bea materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah diatur dalam UU No. 34 Tahun 2000. Pajak daerah dibedakan menjadi dua, antara lain : yaitu Pajak Provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten atau Kota terdiri Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan.

Selain pengelompokan tersebut, pajak juga dapat dibedakan menjadi dua, antara lain :

a. Pajak Final

Pajak final berarti pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan pada total PPh yang terutang pada akhir tahun saat pengisian SPT Tahunan PPh.

b. Pajak Tidak Final

Pajak tidak final adalah pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan dan dapat dikreditkan pada total PPh yang

terutang pada akhir tahun saat pengisian SPT Tahunan. Misalnya, Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, dan 24, serta PPN.¹⁷

B. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh daerah seperti Provinsi, Kabupaten maupun Kota madya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing.¹⁸

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 1 ayat (8) yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁹

2. Pengklasifikasian Pajak Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membedakan antara jenis pajak daerah yang dipungut oleh Provinsi dan jenis pajak yang dipungut oleh Kabupaten/Kota. Pajak daerah yang dipungut oleh Provinsi ditetapkan terdiri atas 5 jenis pajak, yaitu :

- a. Pajak kendaraan bermotor
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak air permukaan

¹⁷Aldo Adam, "Hubungan Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Studi Kasus: Kota Manado periode 2005-2011)", *Jurnal EMBA*, Vol.1 no.3, (Juni 2013), hal. 668.

¹⁸Nio Anggun Sripradita et. al, "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri)", *Jurnal-e Perpajakan*, vol. 1 no. 1, (2014), hal.2.

¹⁹Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 1 ayat (8)

- e. Pajak rokok.²⁰

Sedangkan Pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten Tanah Datar terdiri atas :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.²¹

3. Peranan Pajak Daerah dalam Mendukung Pembiayaan Daerah

Pada berbagai literatur yang membahas pembiayaan publik, pajak merupakan sumber utama pembayaran pengeluaran Pemerintah. Seperti menurut pendapat Kaho, pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama dalam membiayai *public investment*. Tujuan penetapan pajak adalah untuk mengalihkan kontrol sumber daya ekonomi dari wajib kepada Negara dalam hal pemanfaatan atau transfer terhadap wajib pajak yang lain. Pajak daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan

²⁰Nio Anggun Sripradita, et. al, "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri)," *Jurnal e-Perpajakan*, No. 1 volume 1, (2014), hal. 2.

²¹Peraturan Daerah...,pasal 2.

pembangunan Daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh Daerah pada umumnya dalam kaitan penggalian sumber-sumber pajak daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Pajak daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan Pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan serta pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Kriteria pajak daerah secara spesifik diuraikan oleh K.J Davey, yang terdiri dari empat hal, yaitu: pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan dari daerah sendiri, pajak yang dipungut berdasarkan peraturan Pemerintah Pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya peningkatan penerimaan daerah, antara lain: tingginya tingkat kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan *fiscal gap*; belum diketahuinya potensi PAD yang mendekati kondisi riil.

Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu, diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau

obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifikasi pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem yang berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak *up-to-date*. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya: baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

Upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Memperluas basis penerimaan.

Tindakan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain mengidentifikasi pembayaran pajak baru/potensial dan jumlah pembayaran pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

b. Memperkuat proses pemungutan.

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

c. Meningkatkan pengawasan.

Meningkatkan pengawasan, antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

- d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
- e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.²²

C. Pajak Reklame

1. Pengertian Pemungutan Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.²³

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 pasal 1 ayat (20) tentang Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Pemasangan Reklame serta Nilai Perolehan Air Tanah menyatakan bahwa yang dimaksud pemungutan pajak reklame Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan

²²Khairunnisa, "Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus: Kota Bandung)," *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol 22/No.3, (Desember 2011), hal. 229-231.

²³Ridwan, "Kontribusi Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan," *Jurnal Administrasi Negara*, Vol 1, No 02, (2013), hal. 326.

penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.²⁴

2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame

Dasar hukum pemungutan pajak reklame pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Reklame.
- e. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Reklame pada Kabupaten/Kota yang dimaksud.²⁵

3. Obyek dan Bukan Obyek Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 6 Tahun 2011, pasal 18 ayat (1) Tentang Pajak Daerah, yang merupakan Obyek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame. Dan pada ayat ke (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Reklame Papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
- b. Reklame Kain;
- c. Reklame Melekat, stiker;
- d. Reklame Selebaran;
- e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;

²⁴Peraturan Bupati Tahun 2012 tentang Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Pemasangan Reklame serta Nilai Perolehan Air Tanah Pasal 1 ayat (20)

²⁵Yan Yan, et. al, "Analisis Peranan dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi", *Jurnal Penelitian*, hal 3.

- f. Reklame Udara;
- g. Reklame Apung;
- h. Reklame Suara;
- i. Reklame Film/*slide*, dan
- j. Reklame Peragaan.

Sedangkan pada ayat (3) yang bukan termasuk sebagai objek Pajak Reklame yaitu:

- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. Label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.²⁶

4. Subyek dan Wajib Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pasal 19 ayat (1), Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. Sedangkan yang merupakan Wajib Pajak Reklame yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak daerah pasal 19 ayat (2) adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.²⁷

5. Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame

²⁶Peraturan Daerah...,pasal 18 ayat (1-3)

²⁷Peraturan Daerah...,pasal 19 ayat (1-2)

a. Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar tahun 2012 tentang Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan tata cara pemasangan reklame serta perolehan air tanah pasal 2 ayat (1-4) bahwa yang merupakan dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Pajak reklame dikenakan berdasarkan penyelenggaraan oleh pihak ketiga dan penyelenggaraan sendiri oleh wajib pajak.

Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Sedangkan dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.²⁸

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar tahun 2012 tentang Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan tata cara pemasangan reklame serta perolehan air tanah pasal 3 ayat (1-4) yang merupakan nilai kontrak untuk penyelenggaraan reklame oleh pihak ketiga yaitu biaya kegiatan penyelenggaraan reklame ditetapkan berdasarkan kesepakatan pihak yang melakukan transaksi perjanjian pekerjaan dalam bentuk Akta Perjanjian. Sedangkan Nilai Sewa Reklame untuk penyelenggaraan sendiri oleh wajib pajak ditetapkan berdasarkan nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis lokasi reklame. Nilai jual objek pajak reklame ditetapkan berdasarkan jenis Reklame, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penyelenggaraan, jumlah, ukuran reklame. Nilai strategis lokasi reklame ditetapkan berdasarkan kriteria tempat lokasi pemasangan reklame.²⁹

²⁸Peraturan Bupati...,Pasal 2 ayat (1-4)

²⁹Peraturan Bupati...,Pasal 3 ayat (1-4)

Tabel dibawah ini merupakan Nilai jual objek pajak reklame (NJOPR) dengan rincian sebagai berikut :³⁰

Tabel 2.1
Nilai Jual Objek Pajak Reklame

No	Jenis Reklame	Konstruksi	Ukuran Satuan	NJOPR satu sisi (Rp)	NJOPR dua sisi (Rp)
1.	Billboard	a. Pipa <i>besi</i> , plat <i>besi</i> , seng plat, aluminium, cat, instalasi listrik dan sejenisnya.	Per M2 1 Muka	250.000	400.000
		b. Kayu, Papan, triplek, Seng Plat, Aluminium , cat dan sejenisnya.	Per M2 1 Muka	230.000	350.000
2.	Megatron, Neon Box	Plastik, kertas, aluminium, besi, instalasi listrik, cat dan sejenis lainnya.	Per M2 1 Muka	260.000	420.000
3.	Reklame Papan	a. Papan, Kayu, seng plat, Aluminium , pipa besi, cat instalasi listrik dan jenis lainnya	Per M2 1 Muka Per M2 1 Muka	200.000	330.000
		b. Kayu, papan, triplek, Cat dan sejenis lainnya		150.000	240.000
4.	Reklame kain,	Kain, tali	Per M2	150.000	-

³⁰Peraturan Bupati...,Pasal 3 ayat (5)

	Spanduk	plastic, kayu, cat dan sejenis lainnya			
5.	Reklame melekat	– Reklame melekat pada dinding bangunan dan sejenisnya	Per M2 1 Muka	100.000	-
6.	1. Selebaran, stiker 2. poster	a. Kertas, kertas plastic dan sejenisnya (ukuran 1 – 40 cm) b. Kertas, kertas plastik dan sejenisnya (ukuran 40 -90 cm)	Per 20 lbr Per 20 lbr	50.000 100.000	- - -
7.	Reklame berjalan	Reklame berjalan pada mobil dan sejenis	Per M2	150.000	-
8.	Reklame Udara	Balon udara, kain, triplek, karton tebal dan sejenis lainnya	1 bh	3.500.000	-
9.	a. Untuk usaha	Sda	1 set	1.200.000	-
	b. Untuk usaha	Sda	1 set	1.200.000	-
10.	Reklame Film/ Slide	Proyektor, kertas slide, layar film dengan segala peralatan yang digunakan	- Per 5 bh slide film - Per 5 tayangan film	500.000 650.000	- -
11.	Reklame Peragaan	Segala jenis untuk reklame peragaan	Per 1 buah alat peraga	600.000	-

Dibawah ini merupakan tabel Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) dengan rincian sebagai berikut :³¹

Tabel 2.2
Nilai Strategis Pemasangan Reklame

No	Jenis Lokasi	Nilai Strategi (Rp)
1.	Pada jalan Negara dan Ibu Kota batusangkar	80.000
	a. Untuk Reklame Billboard dan sejenis dengan Subjek Wajib Pajak berada Luar Daerah	20.000
	b. Jenis Reklame lainnya	
2.	Pada Jalan Provinsi	60.000
	a. Untuk reklame Billboard dan sejenis dengan Subjek Wajib Pajak berada Luar Daerah	17.000
	b. Jenis reklame lainnya	
3.	Pada Jalan Kabupaten	15.000
4.	Dalam Pasar Kecamatan/ Nagari	40.000

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pasal 20 ayat (1), Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame kemudian pada ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga maka ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Namun pada ayat (3) menyatakan jika reklame diselenggarakan sendiri maka nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.³²

Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR), yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame. Nilai sewa reklame ditentukan melalui nilai jual objek reklame (NJOR) dan nilai strategis pemasangan reklame (NSPR).

NSR dapat dihitung dengan rumus:³³

³¹Peraturan Bupati...,Pasal 3 ayat (6)

³²Peraturan Daerah...,pasal 20 ayat (1-3)

³³Yan Yan, et. al,"Analisis Peranan dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi", *Jurnal Penelitian*, hal 4.

$$NSR = NJOPR + NSPR$$

b. Tarif Pajak Reklame

Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, setiap Daerah Kota/Kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan Kota/Kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari 25% (dua puluh lima persen).³⁴

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah pasal 21, Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).³⁵

c. Cara Perhitungan Pajak Reklame

Pajak reklame dapat dihitung dengan rumus:³⁶

$$Pajak Reklame = 25\% \times NSR$$

D. Akuntansi Pemerintah

Akuntansi Pemerintah Daerah dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

³⁴Handro Rori, "Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Reklame di Kota Manado," *Jurnal EMBA*, Vol.1 No.3 (Juni 2013), hal. 430.

³⁵Peraturan Daerah..., pasal 21.

³⁶Yan Yan, et. al, "Analisis Peranan dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi", *Jurnal Penelitian*, hal 4.

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akuntansi Pemerintah Daerah yang disebutnya sebagai Akuntansi Keuangan Daerah sebagai berikut :

Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas Pemerintahan Daerah (Kabupaten, Kota, atau Provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal Pemerintah Daerah yang memerlukan.

Akuntansi Pemerintah menghususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan Pemerintah. Akuntansi Pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan Negara. Disamping itu, bidang itu meliputi pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran Negara, termasuk kesesuaiannya dengan UU yang berlaku.³⁷

Akuntansi keuangan daerah adalah akuntansi yang dipakai oleh Pemerintah Daerah, untuk melakukan manajemen dan pengelolaan keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengurus dan mengatur rumah tangga Pemerintah Daerah. Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi.³⁸

Sedangkan Pemerintah Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh lembaga Pemerintahan daerah (Pemda dan DPRD). Hubungan antara pemerintah daerah dengan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan, sama dan sejajar.³⁹

4. ³⁷Deddi Nordiawan, et. al, *Akuntansi Pemerintahan*, (Jakarta: Selemba Empat, 2007), hal.

³⁸Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008), hal. 211.

³⁹Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi...*, hal. 215.

Jadi dengan adanya akuntansi keuangan daerah, Pemerintah Daerah dapat mengatur keuangan daerah secara maksimal khususnya pada pemungutan pajak reklame

E. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Siahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah antara lain adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain bagian laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.⁴⁰

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh Daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 33 tahun 2004 pasal 1). PAD merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pemanfaatan potensi yang dimiliki Daerah. Dalam era otonomi daerah dituntut untuk mencari alternatif lain yang dapat dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan pendapatan daerah tidak terus bergantung pada pemerintah pusat dalam mendanai semua aktivitas di daerah. Pemerintah Daerah diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan secara maksimal untuk melakukan pembangunan daerah dengan cara menggali sumber-sumber keuangan yang memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah sebagai PAD.⁴¹

⁴⁰Triski Intan Meylani Lengkong, et. Al, “Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung)”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, vol.15 no. 04, (2015), hal.91.

⁴¹Nio Anggun Sripradita, et. al, “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri)”, *Jurnal e-Perpajakan*, Vol. 1 No. 1, (2014), hal. 3.

2. Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
 - 4) Lain-lain PAD yang sah,
- b. Dana perimbangan dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan undang-undang. Hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti huruf a nomor (3 dan 4) ditetapkan dengan Perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dana perimbangan terdiri atas :

- 1) Dana Bagi Hasil
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU)
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK), (UU no. 32/2004 pasal 159).

Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan.
- b. Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- c. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, pasal 25, dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam berasal dari :

- 1) Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan dana roboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

- 2) Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi(*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.
- 3) Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan perusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan.
- 4) Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.
- 5) Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.
- 6) Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian pemerintahan, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan wilayah daerah yang bersangkutan.

DAU dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam Negeri netto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-Undang (pasal 161).

DAK dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk⁴² :

- 1) Mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintahan atas dasar prioritas Nasional.
- 2) Mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan.

Dari sisi objek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter,

⁴²Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi...*, hal. 221-223.

dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara terkait pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh objek yang telah disebutkan sebelumnya, yang dimiliki Negara dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, Pemda, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan Negara.

Dari segi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek, sebagaimana disebutkan sebelumnya, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, sampai dengan pertanggungjawaban.

Dari segi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Negara.⁴³

F. Analisis Efektivitas dan Efisiensi serta Kontribusi

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan dengan menggambarkan, menjabarkan dan menganalisa masalah objek yang diteliti yang bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan secara sistematis dan aktual mengenai fakta-fakta serta sifat dari objek penelitian.

2. Efektivitas Pajak

Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.⁴⁴ Efektivitas menunjukkan

⁴³Deddi Nordiawan, et. al, *Akuntansi...*, hal. 12-13.

⁴⁴Muidro Renyowijoyo, *Akuntansi...*, hal. 7.

kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan.⁴⁵ Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar dari pada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁴⁶

Berkaitan dengan masalah perpajakan, menurut Devas efektivitas pajak (*tax effectiveness*) mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi dari pajak tersebut. Efektivitas atau hasil guna pajak merupakan perbandingan antara hasil pemungutan (realisasi) dengan potensi pajak itu sendiri. Dengan demikian efektivitas pajak adalah realisasi penerimaan pajak berbanding dengan potensi penerimaan pajak (pencapaian hasil).⁴⁷

Rasio Efektivitas pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:⁴⁸

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PR}}{\text{Target Penerimaan PR}} \times 100\%$$

Dibawah ini adalah tingkat efektivitas dalam mengukur efektivitas keuangan daerah otonom yang digolongkan kedalam beberapa kategori, yaitu:⁴⁹

Tabel 2.3

⁴⁵ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga. 2006), hal. 78.

⁴⁶ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi Offset. 2009), hal.134.

⁴⁷Eni Kustiyah, Suryani “Efektivitas Pajak Reklame terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya”, *Jurnal Paradigma* ,Vol. 12, No. 02, Agustus 2014 – Januari 2015, hal. 217.

⁴⁸Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah edisi ketiga*,(Yogyakarta: STIM YKPN. 2016), hal.142.

⁴⁹Mahmudi, *Analisis...*, hal.141.

Tingkat Mengukur Efektivitas Keuangan Daerah

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Tingkat efektivitas pajak reklame dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak reklame dengan target penerimaan pajak reklame. Apabila perhitungan efektivitas pajak reklame menghasilkan angka atau presentase mendekati atau melebihi 100%, maka pajak reklame semakin efektif atau dengan kata lain kinerja pemungutan pajak reklame Kabupaten Tanah Datar semakin baik. Dalam penelitian ini yang dipertimbangkan dalam menentukan efektivitas hanya pencapaian target.

3. Efisiensi Pajak

Efisiensi merupakan perbandingan keluaran/masukan (output/input) yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.⁵⁰ Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.⁵¹

Rasio Efisiensi Pajak Daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:⁵²

$$Efisiensi = \frac{\text{Biaya Pemungutan PR}}{\text{Realisasi Penerimaan PR}} \times 100\%$$

Dalam organisasi sektor publik setiap pengeluaran perlu dibuat standar belanjanya sebagai bentuk standar biaya. Pengukuran efisiensi

⁵⁰ Muidro Renyowijoyo, *Akuntansi...*, hal.7

⁵¹ Mardiasmo, *Akuntansi...*, hal.133.

⁵² Mahmudi, *Analisis...* hal.142.

dilakukan dengan cara membandingkan realisasi belanja dengan standar belanjanya.⁵³

Di bawah ini adalah tabel persentase efisiensi Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah, dapat dikategorikan sebagai berikut:⁵⁴

Tabel 2.4
Tingkat Efisiensi Terhadap Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
<10%	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
>40%	Tidak Efisien

4. Kontribusi Pajak

Kontribusi yang diberikan seseorang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian mejadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi.⁵⁵

Kontribusi Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:⁵⁶

$$Kontribusi = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PR}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Di bawah ini adalah tabel persentase kontribusi Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah, dapat dikategorikan sebagai berikut:⁵⁷

⁵³ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015), hal. 86.

⁵⁴ Mahmudi, *Analisis...*, hal.142

⁵⁵ Mourin. M. Mosal, "Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan dikota Manado", *Jurnal EMBA* , Vol.1 No.4 (Desember 2013), hal. 377.

⁵⁶ Mohammad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.2013), hal.153.

Tabel 2.5
Tingkat Kontribusi Pajak Reklame terhadap Penerimaan pajak Daerah

Persentase	Skala Kontribusi
>50%	Sangat Baik
40,10 – 50%	Baik
30,10 – 40%	Cukup Baik
20,10%-30%	Sedang
10,10% - 20%	Kurang
<10%	Sangat Kurang

G. Penelitian yang Relevan

Penelitian sebelumnya mengenai Pajak Reklame diantaranya adalah penelitian yang dilakukan Saddam pada tahun 2014 menulis tentang “Intensifikasi Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone”, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan hasil dari penelitian ini yaitu Intensifikasi pemungutan pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone sudah cukup baik dan rata-rata Kontribusi Pajak Reklame terhadap pajak daerah Kabupaten Bone dari tahun 2009-2012 sebesar 0,61 %. Dalam hal ini Kontribusi Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Bone dikategorikan tidak Efektif.⁵⁸ Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan adalah penelitian sebelumnya mengukur besar intensifikasi dan kontribusi pajak reklame di Kabupaten Bone. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menganalisis mengenai efektivitas, efisiensi serta kontribusi pajak reklame di Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Andi Mahyudin Pawiloi pada tahun 2014 tentang “Analisis Kontribusi Pajak Reklame dan

⁵⁷ Adhika Ratdianto, dkk, Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus DPKAD Proboling), *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol 8 No 1 2016, hal.3.

⁵⁸ Saddam *Intensifikasi Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Tahun 2009-2012, 2014.*

Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar”, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kuantitatif dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak reklame dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar pada tahun 2009-2013 adalah relatif tidak signifikan karena tren keduanya berbanding terbalik dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir dan efektivitas penerimaan pajak reklame dan pajak hotel menurun dalam lima tahun terakhir sehingga belum mampu meningkatkan kontribusi pajak reklame dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.⁵⁹ Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan yaitu terletak pada metode analisis data yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya fokus pada analisis kontribusi. Sedangkan pada penelitian ini penulis bukan hanya sekedar membahas mengenai analisis kontribusi tapi juga membahas tentang analisis efektivitas dan juga analisis efisiensi dan perbedaan penelitian juga terletak pada jenis pajak yang diteliti. Pada Penelitian sebelumnya fokus pada dua jenis pajak yaitu pajak hotel dan pajak reklame. Sedangkan pada penelitian ini penulis hanya fokus pada pajak reklame.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Junius nanda purna ebtawan pada tahun 2012 tentang “Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Madiun tahun 2002-2011”, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis rasio, DDF (Derajat Desentralisasi Fiskal), Elastisitas PAD, dan hasil dari analisis rasio menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak di kota Madiun terbesar yaitu pada tahun 2011 mencapai 155 % dari target yang telah ditentukan, tingkat efisiensi pemungutan pajak di kota Madiun sudah efisien, hal ini ditunjukkan dari rasio biaya pemungutan pajak daerah terhadap realisasi penerimaan pajak

⁵⁹Andi Mahyudin Pawiloi, *Analisis Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar*, 2014.

rata-rata sebesar 0,7 %, kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah berasal dari pajak penerangan jalan yang bersumber dari PLN mencapai rata-rata sebesar 53,92 %.⁶⁰ Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan terletak pada jenis pajak yang digunakan, pada penelitian sebelumnya membahas pajak daerah secara keseluruhan sedangkan pada penelitian penulis fokus pada salah satu dari pajak daerah yaitu pajak reklame dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang fokus pada analisis efektivitas, analisis efisiensi dan analisis kontribusi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Irsal husnur pada tahun 2015 tentang “Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi (Studi Kasus di Pemerintah Bukittinggi) dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Hotel Kota Bukittinggi tahun 2010 termasuk kategori Cukup efektif, tahun 2011 termasuk kategori efektif, tahun 2012 termasuk kategori efektif, tahun 2013 termasuk kategori cukup efektif dan tahun 2014 termasuk kategori efektif. Untuk efektivitas penerimaan Pajak Restoran Kota Bukittinggi tahun 2010 sampai tahun 2014 persentase penerimaan pajaknya rata tidak melebihi target, tahun 2010 termasuk kategori kurang efektif, tahun 2011 termasuk kategori cukup efektif, tahun 2012-2014 termasuk kategori kurang efektif. Untuk Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi periode 2010-2014 secara keseluruhan memberikan kontribusi yang kurang terhadap PAD dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi periode 2010-2014 secara keseluruhan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap PAD Kota

⁶⁰ Junius Nanda Purna ebtawan, *Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah dan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Madiun tahun 2002-2011, 2012*

Bukittinggi.⁶¹ Perbedaan penelitian ini dengan yang penulis lakukan terletak pajak jenis pajak yang diteliti, pada penelitian sebelumnya membahas dua jenis pajak daerah yaitu pajak hotel dan pajak restoran, sedangkan dalam penelitian ini peneliti hanya fokus pada pajak reklame. Pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan analisis efektivitas dan analisis kontribusi, sedangkan dalam penelitian ini penulis bukan hanya menggunakan analisis efektivitas, analisis kontribusi tapi juga menggunakan analisis efisiensi.

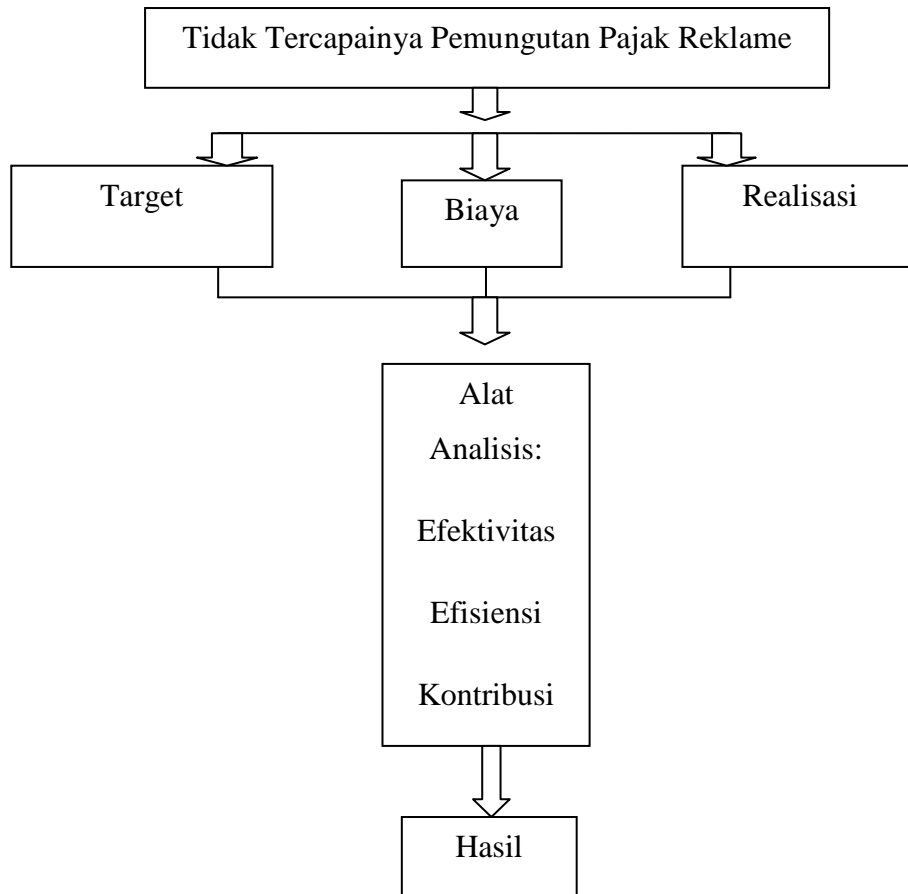
H. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁶²

⁶¹ Irsal Husnur, *Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi (Studi Kasus di Pemerintah Kota Bukittinggi)*, 2015.

⁶² Nuryaman, *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hal.60

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dalam hal ini dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi serta kontribusi Pajak reklame yang dipungut terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2011-2015.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan eksplorasi, menggambarkan dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku didasarkan pada data yang diperoleh di lapangan.⁶³

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bertempat di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar, waktu penelitian dimulai dari bulan Desember 2016-Februari 2017.

C. Metode Penelitian

Sumber Data dalam penelitian ini Penulis menggunakan sumber data sekunder dalam bentuk laporan tahunan (Laporan Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Tanah Datar tahun 2011-2015), Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta Perundang-undangan terkait dengan Pajak Reklame dan sumber yang berkaitan dengan Pajak Reklame, serta dokumen-dokumen, catatan-catatan dan referensi lain yang berhubungan dengan masalah yang Penulis teliti.

⁶³Sukardi, *Metodologi penelitian akuntansi*, (Jakarta : Erlangga, 2012), hal. 14

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang Penulis gunakan dalam mengambil data-data dokumen yang Penulis dapatkan dari Laporan Tahunan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar untuk menelusuri data historis yang tersedia dalam bentuk surat-surat, catatan harian, laporan dan data lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

E. Teknik Analisis Data

1. Analisis Efektivitas

Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.⁶⁴ Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan.⁶⁵ Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar dari pada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁶⁶

Berkaitan dengan masalah perpajakan, menurut Devas efektivitas pajak (*tax effectiveness*) mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi dari pajak tersebut. Efektivitas

⁶⁴ Muidro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*, (Jakarta: Mitra Wacana Media. 2008), hal. 7.

⁶⁵ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga. 2006), hal. 78.

⁶⁶ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi Offset. 2009), hal.134.

atau hasil guna pajak merupakan perbandingan antara hasil pemungutan (realisasi) dengan potensi pajak itu sendiri. Dengan demikian efektivitas pajak adalah realisasi penerimaan pajak berbanding dengan potensi penerimaan pajak (pencapaian hasil).⁶⁷

Rasio Efektivitas pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:⁶⁸

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PR}}{\text{Target Penerimaan PR}} \times 100\%$$

Dibawah ini adalah tingkat efektivitas dalam mengukur efektivitas keuangan daerah otonom yang digolongkan kedalam beberapa kategori, yaitu:⁶⁹

Tabel 3.1
Tingkat Mengukur Efektivitas Keuangan Daerah

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Tingkat efektivitas pajak reklame dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak reklame dengan target penerimaan pajak reklame. Apabila perhitungan efektivitas pajak reklame menghasilkan angka atau presentase mendekati atau melebihi 100%, maka pajak daerah semakin efektif atau dengan kata lain kinerja pemungutan pajak reklame Kabupaten Tanah Datar semakin baik. Dalam penelitian ini

⁶⁷Eni Kustiyah, Suryani “Efektivitas Pajak Reklame terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya”, *Jurnal Paradigma* ,Vol. 12, No. 02, Agustus 2014 – Januari 2015, hal. 217.

⁶⁸Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Ketiga*,(Yogyakarta: STIM YKPN.2016), hal.142.

⁶⁹Mahmudi, *Analisis...*, hal.141.

yang dipertimbangkan dalam menentukan efektivitas hanya pencapaian target.

2. Analisis Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan keluaran/masukan (output/input) yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.⁷⁰ Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.⁷¹

Rasio Efisiensi Pajak Daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:⁷²

$$Efisiensi = \frac{\text{Biaya Pemungutan PR}}{\text{Realisasi Penerimaan PR}} \times 100\%$$

Dalam organisasi sektor publik setiap pengeluaran perlu dibuat standar belanjanya sebagai bentuk standar biaya. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan realisasi belanja dengan standar belanjanya.⁷³

Di bawah ini adalah tabel persentase efisiensi Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah, dapat dikategorikan sebagai berikut:⁷⁴

Tabel 3.2
Tingkat Efisiensi Terhadap Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
<10%	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
>40%	Tidak Efisien

⁷⁰ Muidro Renyowijoyo, *Akuntansi...*, hal.7

⁷¹ Mardiasmo, *Akuntansi...*,hal.133.

⁷² Mahmudi, *Analisis...*,hal.142.

⁷³ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015), hal. 85.

⁷⁴ Mahmudi, *Analisis...*, hal.142

3. Analisis Kontribusi

Kontribusi yang diberikan seseorang untuk meningkatkan efisisensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian mejadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi.⁷⁵

Kontribusi Pemungutan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:⁷⁶

$$Kontribusi = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PR}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Di bawah ini adalah tabel persentase kontribusi Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah, dapat dikategorikan sebagai berikut:⁷⁷

Tabel 3.3
Tingkat Kontribusi Pajak Reklame terhadap Penerimaan pajak Daerah

Persentase	Skala Kontribusi
>50%	Sangat Baik
40,10 – 50%	baik
30,10 – 40%	Cukup Baik
20,10%-30%	Sedang
10,10% - 20%	Kurang
<10%	Sangat Kurang

Analisis kontribusi yang dibahas dalam penelitian ini yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar. Diharapkan dengan semakin

⁷⁵Mourin. M. Mosal, “Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan dikota Manado”, *Jurnal EMBA* , Vol.1 No.4 (Desember 2013), hal. 377.

⁷⁶ Mohammad Mahsun, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.2013), hal.153.

⁷⁷ Adhika Ratdianto,dkk, Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus DPKAD Proboling), *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol 8 No 1 2016, hal.3.

tingginya kontribusi pajak reklame maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah. Analisis kontribusi ini membandingkan antara realisasi penerimaan pajak reklame terhadap total Pendapatan Asli Daerah. Dari analisis ini kita akan mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah berdirinya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar

Salah satu kebijakan Kabupaten Tanah Datar dalam usaha peningkatan pendapatan daerah ini adalah dengan membentuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). Salah satu tujuan pembentukan Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) ini adalah agar pengelolaan keuangan dan aset dapat dilakukan secara terpadu sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal terhadap pendapatan Daerah.⁷⁸

Dalam rangka efektifitas, efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar melakukan penyempurnaan dan penataan organisasi Perangkat Daerah (SKPD), maka dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2008, tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah dirubah dengan peraturan Nomor 9 Tahun 2010 tentang pembentukan Organisasi dan tata kerja Kepala Daerah. Dinas ini merupakan gabungan antara Dinas Pendapatan dengan bagian Kuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Dengan penggabungan ini pengelolaan keuangan baik belanja maupun pendapatan bahkan aset dikelola dengan baik.⁷⁹

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar merupakan satuan kerja yang berkedudukan sebagai penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

⁷⁸ Rini Yulianti (dkk), *Profil Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar*.

⁷⁹ Rini Yulianti (dkk), *Profil Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar*.

Kabupaten Tanah Datar. Dasar hukum pembentukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2008.⁸⁰

B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar, ditetapkan tugas pokok Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut: *“Melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah di Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas pembantuan”*.

2. Fungsi

Dalam Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 ditetapkan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dan tugas di bidang penetapan pendapatan dan evaluasi, penagihan pendapatan, anggaran, akuntansi dan pengelolaan aset daerah.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penetapan dan evaluasi, penagihan pendapatan, anggaran, akuntansi dan pengelolaan aset daerah.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang penetapan dan evaluasi, penagihan pendapatan, anggaran, akuntansi dan pengelolaan aset daerah.

⁸⁰ Rini Yulianti (dkk), *Profil Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar*.

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁸¹

C. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar

1. Visi DPPKA Kabupaten Tanah Datar

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPKA Kabupaten Tanah Datar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010, maka telah ditetapkan Visi DPPKA Kabupaten Tanah Datar yang merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai, yaitu *“Terwujudnya Pendapatan Daerah Yang Optimal melalui Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dengan Manajemen yang Baik.”*

2. Misi DPPKA Kabupaten Tanah Datar

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai dimasa depan. Untuk mewujudkan Visi yang ingin dicapai, telah dirumuskan Misi sebagai berikut:

- a. *Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan dan Asset Daerah yang Rasional, Transparan, Partisipatif dan bertanggungjawab*
- b. *Meningkatkan pelayanan pada Masyarakat*
- c. *Meningkatkan kinerja Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah yang efektif dan efisien.*⁸²

⁸¹ Rini Yulianti (dkk), *Profil Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar.*

⁸² Rini Yulianti (dkk), *Profil Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar.*

D. Struktur Organisasi dan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar

1. Struktur organisasi

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2011 meliputi unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, unsur Staf yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, ditetapkan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar seperti yang terlihat pada gambar 4.1

Susunan kepegawaian dan jumlah pegawai pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Tanah Datar dikelompokkan kedalam *Bezzeting Pegawai*, dengan jumlah 70 orang. Berdasarkan komposisi kepangkatan, PNS pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Tanah Datar terdiri dari :

- a. PNS golongan II : 22 orang
- b. PNS golongan III : 43 orang
- c. PNS golongan IV : 5 orang

Berdasarkan tingkat Pendidikan, aparatur pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Tanah Datar dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Tamatan S2 : 5 orang
- b. Tamatan S1 : 28 orang
- c. Tamatan D-3 : 17 orang
- d. Tamatan SLTA : 19 orang
- e. Tamatan SLTP : 1 orang

Berdasarkan komposisi tingkat pendidikan dirasakan bahwa untuk mendukung kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Tanah Datar, kedepan masih perlu ditingkatkan lagi. Diharapkan kualitas SDM Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset

Kabupaten Tanah Datar akan semakin meningkat melalui diklat teknis maupun diklat formal. Disamping itu, dalam rekrutme pegawai baru juga harus memperhatikan syarat kompetensi kerja sehingga diharapkan kinerja pegawai baru akan lebih baik.

Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Tanah Datar, didukung oleh perangkat lain :

- a. Gedung berserta perlengkapan : 2 unit
- b. Kendaraan Roda 4 : 8 unit
- c. Kendaraan Roda 2 : 11 unit

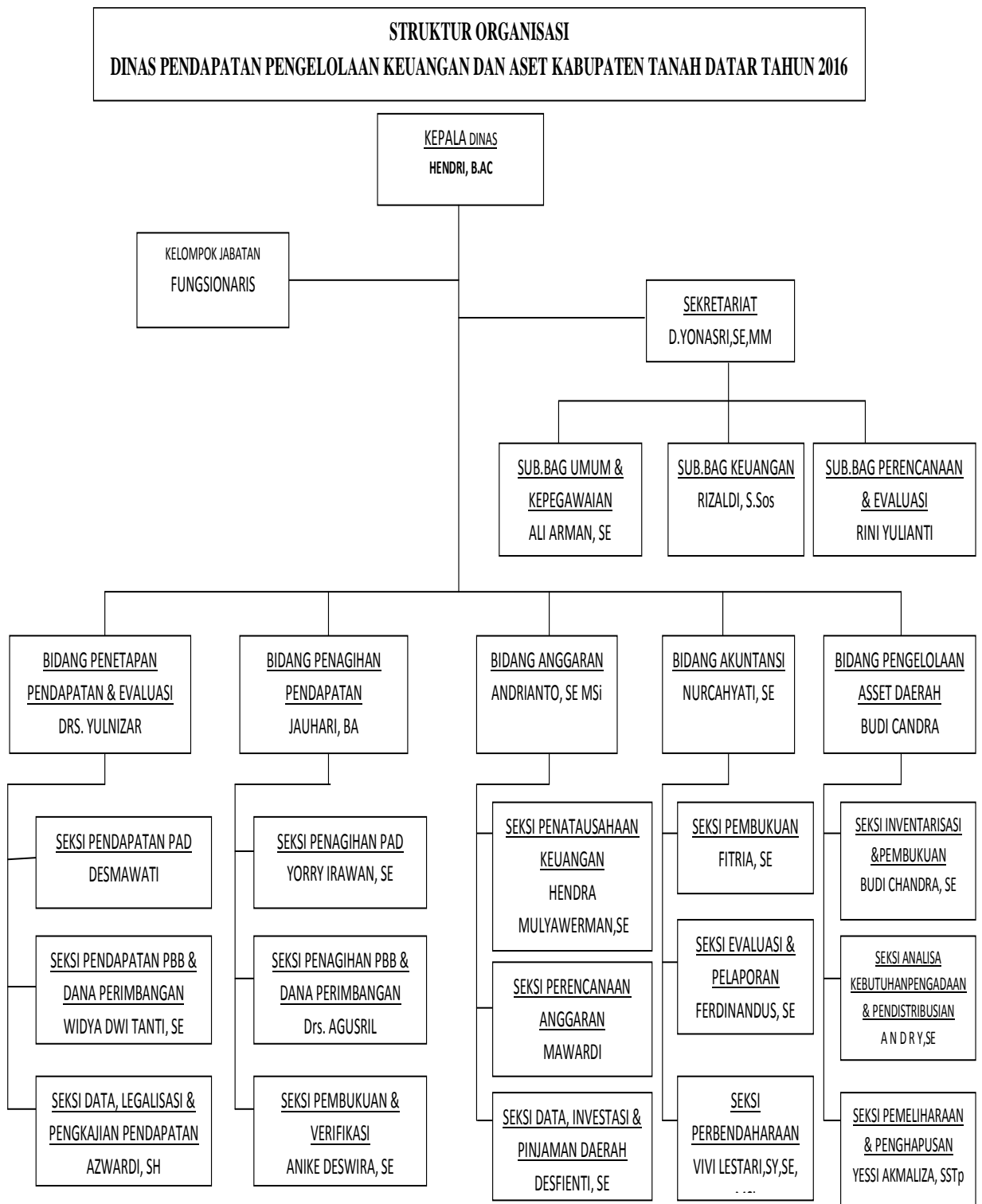
2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbag Umum dan Kepegawaian
 - 2) Subbag Keuangan
 - 3) Subbag Perencanaan dan Evaluasi
- c. Bidang penetapan pendapatan dan Evaluasi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendataan Pendapatan Asli Daerah
 - 2) Seksi Pendataan Pajak Bumi
 - 3) Seksi Data, Legalisasi dan Pengkajian Pendapatan
- d. Bidang Penagihan Pendapatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penagihan Pendapatan Asli Daerah
 - 2) Seksi Penagihan Pajak Bumi Bangunan dan Dana Perimbangan
 - 3) Seksi Pembukuan dan Verifikasi
- e. Bidang anggaran, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penatausahaan Keuangan
 - 2) Seksi Perencanaan Anggaran
 - 3) Seksi Data, Investasi dan Pinjaman Daerah

- f. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembukuan
 - 2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan
 - 3) Seksi Perbendaharaan
- g. Bidang pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari :
 - 1) Seksi Inventarisasi dan Pembukuan
 - 2) Seksi Analisa Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian
 - 3) Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.⁸³

⁸³ Rini Yulianti (dkk), *Profil Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar*.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi DPPKA Kabupaten Tanah Datar

E. Kegiatan Utama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang
 - b. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, keuangan dan urusan kepegawaian.
 - c. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pendataan dan penetapan, bidang penagihan dan bidang pengolahan keuangan yaitu bidang Akuntansi, bidang anggaran dan bidang aset.
 - d. Penyelenggaraan bidang administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya.
 - e. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dngan lingkup tugasnya.
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas.
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- ### **2. Sekretariat mempunyai fungsi**
- a. Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas dinas.
 - b. Pelaksanaan dan penjabaran peraturan Perundang-Undangan.
 - c. Pelaksanaan dan perumusan rencana strategik.
 - d. Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organisasi.

- e. Pelaksanaan fasilitas kelancaran tugas dan urusan berdasarkan azas keseimbangan, dan
 - f. Pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD.
3. Bidang Penetapan, Pendapatan dan Evaluasi.

Bidang Penetapan Pendataan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup penetapan pendataan dan evaluasi. Bidang penetapan pendapatan dan evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karir bawahan.
- f. Melakukan penyusunan data potensi pajak daerah sebagai dasar perencanaan penerimaan khusus pajak daerah
- g. Melakukan pemutahiran basis data potensi pajak daerah secara berkala.
- h. Melakukan uji petik terhadap pengelolaan pajak daerah
- i. Mencari, menghimpun dan mengelolah objek wajib pajak daerah.
- j. Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak daerah.

- k. Menyiapkan bahan formulir sebagai pedoman dan petunjuk pengisian pendaftaran wajib pajak.
 - l. Melakukan pendistribusian, pengadministrasian dan pelaporan atas pendaftaran objek dan wajib pajak daerah.
 - m. Menetapkan nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
 - n. Melakukan penyimpanan arsip yang berkaitan dengan pendataan dan pendaftaran wajib pajak.
 - o. Melaksanakan pembinaan pajak daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
 - p. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan.
 - q. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah
4. Bidang Penagihan Pendapatan membawahi
- a. Seksi penagihan Pendapatan Asli Daerah
 - b. Seksi penagihan PBB dan Dana Perimbangan
 - c. Seksi Pembukuan dan Verifikasi

Bidang Penagihan Pendapatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup penagihan pendapatan, kepala bidang penagihan mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- d. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan bidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan.
 - f. Melakukan penagihan pajak daerah terutang berdasarkan ketentuan yang berlaku
 - g. Menyiapkan dan mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah kepada petugas kolektor
 - h. Menyusun pelaporan penerimaan pajak Daerah
 - i. Melakukan pembinaan kepada para kolektor pajak daerah
 - j. Mengkoordinasikan kegiatan penagihan dan pelaporan pajak daerah dengan SKPD / Instansi / unit kerja pengelola pajak Daerah untuk kelancaran pengelolaan
 - k. Melakukan penatausahaan penerimaan pajak daerah
 - l. Menyusun dan melakukan penyuluhan tentang pajak daerah
 - m. Menyusun dan menyiapkan laporan hasil pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak daerah sesuai dengan target yang ditetapkan dan permasalahan yang ditemui dilapangan
 - n. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan
 - o. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah.
5. Bidang Anggaran membawahi:
- a. Seksi penatausahaan Keuangan
 - b. Seksi Perencanaan Anggaran
 - c. Seksi Data, investasi dan pinjaman daerah
- Bidang anggaran mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan

dan program sesuai ruang lingkup anggaran. Dalam melaksanakan tugas Bidang Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas
- b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan
- c. Perencanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas
- d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan
- e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan
- f. Pelaksanaan fasilitas kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan, dan
- g. Pelaksanaan pertanggung jawaban dan laporan.

6. Bidang Akuntansi

Bidang akuntansi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pembukuan
- b. Sub Bidang Pembendaharaan
- c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup anggaran. Dalam melaksanakan tugas bidang akuntansi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas
- b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan
- c. Perencanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas
- d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan
- e. Pelaksanaan fasilitas kelancaran tugas berdasarkan azas kesimbang, dan
- f. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan

7. Bidang Pengelolaan Asset Daerah

Bidang pengelolaan Asset Daerah terdiri dari :

- a. Seksi Investasi dan Pembukuan

- b. Seksi Analisa Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian
- c. Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan

Bidang Pengelolaan Asset Daerah mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup anggaran. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Asset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas.
- b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan.
- c. Perencanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas
- d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan
- e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan
- f. Pelaksanaan fasilitas kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan.
- g. Pelaksanaan pertanggungjawab dan laporan.⁸⁴

F. Pergedungan dan Penataan Ruang Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar

Saat ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar beralamat di Jalan Sultan Alam Bagagansyah, Pagaruyung, terdiri dari 2 bangunan gedung :

- 1. Bangunan pertama terdiri dari :
 - a. Ruang tunggu
 - b. Ruang kepala Dinas
 - c. Ruang Sekretaris
 - d. Ruang Sekretariat
 - e. Ruang Asset
 - f. Ruang penagihan pendapatan
 - g. Ruang penetapan pendapatan dan Evaluasi
 - h. Gudang

⁸⁴ Rini Yulianti (dkk), *Profil Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar*.

- i. Ruang Shalat
 - j. WC/Toilet
2. Bangunan kedua terdiri dari :
- a. Ruang Tunggu
 - b. Ruang Simda
 - c. Ruang Shalat
 - d. Ruang Pencairan Dana
 - e. Ruang Akuntansi
 - f. Ruang Anggaran
 - g. Ruang PBB
 - h. Ruang UPT
 - i. WC/Toilet.⁸⁵

G. Analisis dan Pembahasan

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, melakukan pemungutan terhadap beberapa jenis Pajak Daerah salah satunya yaitu pemungutan pajak reklame.⁸⁶

Seiring semakin pesatnya usaha yang didirikan masyarakat Kabupaten Tanah Datar maka secara otomatis reklame pun tersebar secara luas dikarenakan reklame berfungsi untuk mempromosikan barang yang dijual, maka hal ini akan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar karena Reklame yang dipasang oleh wajib pajak, diwajibkan dibayar setiap tahunnya.

1. Analisis Efektivitas

Efektivitas pemungutan pajak reklame yang dimaksudkan di sini adalah seberapa jauh tercapainya realisasi penerimaan pajak reklame dipungut oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan

⁸⁵ Rini Yulianti (dkk), *Profil Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar*.

⁸⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah .

Asset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar dengan target penerimaan pajak reklame telah ditetapkan.

Rasio efektivitas pemungutan pajak reklame dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:⁸⁷

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PR}}{\text{Target Penerimaan PR}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah perhitungan efektivitas pemungutan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar periode tahun 2011-2015, sebagai berikut:

a. Tahun 2011

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 43.098.445,00}}{\text{Rp. 116.770.376,40}} \times 100\% = 36,91 \%$$

b. Tahun 2012

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 113.693.571,00}}{\text{Rp. 127.583.985,00}} \times 100\% = 89,11 \%$$

c. Tahun 2013

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 92.771.504,00}}{\text{Rp. 162.625.830,00}} \times 100\% = 57,05\%$$

d. Tahun 2014

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 123.563.728,00}}{\text{Rp. 248.252.410,00}} \times 100\% = 49,77\%$$

e. Tahun 2015

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 130.227.364,00}}{\text{Rp. 128.139.565,00}} \times 100\% = 101,63\%$$

⁸⁷Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Ketiga*,(Yogyakarta: STIM YKPN.2016), hal.142.

Untuk lebih rincinya, maka hasil efektivitas pemungutan pajak reklame Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame Kabupaten Tanah Datar
Periode 2011-2015

No	Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	%	Kriteria Efektivitas
1.	2011	43.098.445,00	116.770.376,40	36,91	Tidak Efektif
2.	2012	113.693.571,00	127.583.985,00	89,11	Cukup Efektif
3.	2013	92.771.504,00	162.625.830,00	57,05	Tidak Efektif
4.	2014	123.563.728,00	248.252.410,00	49,77	Tidak Efektif
5.	2015	130.227.364,00	128.139.565,00	101,63	Sangat Efektif

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA) kab. Tanah Datar (Data yang diolah)

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas dari pemungutan pajak reklame Kabupaten Tanah Datar anggaran tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami turun naik persentase. Untuk tahun 2011 Kabupaten Tanah Datar menetapkan target untuk pajak reklame sebesar Rp. 116.770.376,40 akan tetapi realisasinya hanya sebesar Rp. 43.098.445,00 dengan persentase efektifitas pemungutan pajaknya sebesar 36,91%, dan ini termasuk kategori tidak efektif. Hal ini terjadi disebabkan oleh masih sedikitnya wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak.

Tahun 2012, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar menaikkan target sebesar Rp.127.583.985,00 naik dari tahun sebelumnya dan realisasinya mencapai sebesar Rp.113.693.571,00 dengan persentase efektivitas pemungutan pajaknya naik sebesar 89,11% atau meningkat sebesar 52,20% dari tahun sebelumnya, ini termasuk kategori cukup efektif. Hal ini didukung oleh semakin banyaknya masyarakat menggunakan reklame untuk mempromosikan barang dagangan dan ini berpengaruh kepada jumlah wajib pajak dan secara otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak reklame.

Dengan naiknya realisasi pemungutan pajak reklame tahun sebelumnya, maka pada tahun 2013 pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar memutuskan untuk menaikkan target pemungutan pajak reklame. Target pemungutan pajak reklame pada tahun 2012 sebesar Rp.127.583.985,00, sedangkan pada tahun 2013 dinaikkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.162.625.830,00, akan tetapi realisasinya lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu hanya mencapai sebesar Rp.92.771.504,00 dengan persentase efektifitas pemungutan pajaknya sebesar 57,05% atau menurun drastis sebesar 32,06% dari tahun sebelumnya dan ini termasuk kategori tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya SDM dalam pemungutan pajak reklame.

Walaupun pada tahun sebelumnya terjadi penurunan penerimaan pajak reklame. Namun pada tahun 2014 malah target yang ditetapkan sebesar Rp.248.252.410.00 sedangkan realisasi penerimaan pajak reklame yang terjadi hanya sebesar Rp.123.563.728,00 dan ini dikategorikan tidak efektif. Hal ini disebabkan terlalu tingginya pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar menetapkan target pada tahun 2014.

Pada tahun 2015 terjadi realisasi penerimaan pajak reklame yang cukup membaik dikarenakan target penerimaan pajak reklame yang dianggarkan hampir setara dengan realisasi penerimaan pajak reklame yang terjadi pada tahun 2014. Dari target penerimaan pajak reklame yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA) kabupaten Tanah Datar yaitu sebesar Rp.128.139.565.00 dan realisasi Penerimaan pajak reklame yang terjadi mencapai Rp. 130.227.364,00 dan hal ini dikategorikan efektif.

2. Analisis Efisiensi

Efisiensi pemungutan Pajak Reklame yang dimaksudkan di sini adalah perbandingan antara biaya pemungutan pajak reklame dengan realisasi penerimaan pajak reklame yang dipungut oleh Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA) kabupaten Tanah Datar pada tahun 2011 sampai tahun 2015.

Terkait dengan biaya pemungutan pajak peklame, pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar menggabungkan seluruh biaya yang berkaitan dengan pemungutan pajak daerah termasuk didalamnya biaya pemungutan pajak reklame, terkecuali Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena pajak tersebut dipungut oleh Unit Pelayanan Terpadu PBB oleh karena itu pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA) kabupaten Tanah Datar menyarankan peneliti dalam menentukan biaya pemungutan pajak reklame maka realisasi penerimaan pajak reklame dibagi dengan total seluruh penerimaan Pajak Daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA) kabupaten Tanah Datar kemudian dikali 100%. Keputusan seperti ini disarankan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA) kabupaten Tanah Datar karena mereka memperkirakan bahwa antara penerimaan berbanding lurus dengan biaya. Selanjutnya setelah persentase dari penerimaan pajak reklame ditentukan, kemudian dikalikan dengan total biaya pemungutan Pajak Daerah. Tahap terakhir barulah ditentukan efisiensi pemungutan pajak reklame dengan rumus yang telah ditetapkan.⁸⁸

Dibawah ini adalah tabel realisasi penerimaan seluruh Pajak Daerah yang dipungut oleh DPPKA (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset) kabupaten Tanah Datar.

⁸⁸ Anike Deswira (Seksi Pembukuan dan Verifikasi), *Hasil Wawancara*, tanggal 24 Januari 2017

Tabel 4.2
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar
Periode 2011-2015

No	Tahun	Pajak Daerah	Realisasi (Rp)
1.	2011	Pajak Hotel	32.572.676,00
2.		Pajak Restoran	648.650.146,00
3.		Pajak Hiburan	1.400.000,00
4.		Pajak Reklame	43.098.445,00
5.		Pajak Penerangan Jalan	4.465.033.680,00
6.		Pajak Pengambilan Galian Golongan C	213.001.600,00
7.		Pajak Air Tanah	-
Total			5.403.756.547,00
1.	2012	Pajak Hotel	94.771.548,00
2.		Pajak Restoran	766.014.021,00
3.		Pajak Hiburan	6.867.100,00
4.		Pajak Reklame	113.693.571,00
5.		Pajak Penerangan Jalan	4.805.042.263,00
6.		Pajak Parkir	-
7.		Pajak Air Tanah	85.600.413,00
8.		Pajak Sarang Burung Walet	-
9.		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	382.116.838,00
Total			6.254.105.754,00
1.	2013	Pajak Hotel	103.779.249,00
2.		Pajak Restoran	854.608.967,00
3.		Pajak Hiburan	1.721.100,00
4.		Pajak Reklame	92.771.504,00
5.		Pajak Penerangan Jalan	5.209.511.137,00
6.		Pajak Parkir	0,00
7.		Pajak Air Tanah	165.333.994,00

8.		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	461.413.362,93
Total			6.889.139.313,93
1.	2014	Pajak Hotel	83.676.684,00
2.		Pajak Restoran	1.036.362.625,00
3.		Pajak Hiburan	9.146.200,00
4.		Pajak Reklame	123.563.728,00
5.		Pajak Penerangan Jalan	5.925.985.241,00
6.		Pajak Parkir	0,00
7.		Pajak Air Tanah	132.721.232,00
8.		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	595.657.565,00
Total			7.907.113.275,00
1.	2015	Pajak Hotel	140.173.575,00
2.		Pajak Restoran	1.358.442.902,00
3.		Pajak Hiburan	5.800.000,00
4.		Pajak Reklame	130.227.364,00
5.		Pajak Penerangan Jalan	6.403.664.512,00
6.		Pajak Parkir	0,00
7.		Pajak Air Tanah	149.916.260,00
8.		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	618.728.576,00
Total			8.806.953.189,00

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA) kab. Tanah Datar (Data yang diolah)

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, maka dapat dilihat secara rinci realisasi penerimaan Pajak Daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya untuk menentukan persentase biaya untuk pemungutan pajak reklame maka dapat dicari dengan rumus sebagai berikut.⁸⁹

⁸⁹ Anike Deswira (Seksi Pembukuan dan Verifikasi), Hasil Wawancara, tanggal 24 Januari 2017

$$\% \text{ Biaya Pemungutan PR} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PR}}{\text{Total Penerimaan PD}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah perhitungan persentase biaya pemungutan Pajak Reklame periode 2011-2015, sebagai berikut:

a. Tahun 2011

$$\% = \frac{\text{Rp. 43.098.445,00}}{\text{Rp. 5.403.756.547,00}} \times 100\% = 0,797\%$$

b. Tahun 2012

$$\% = \frac{\text{Rp. 113.693.571,00}}{\text{Rp. 6.254.105.754,00}} \times 100\% = 1,817\%$$

c. Tahun 2013

$$\% = \frac{\text{Rp. 92.771.504,00}}{\text{Rp. 6.889.139.313,93}} \times 100\% = 1,346\%$$

d. Tahun 2014

$$\% = \frac{\text{Rp. 123.563.728,00}}{\text{Rp. 7.907.113.275,00}} \times 100\% = 1,562\%$$

e. Tahun 2015

$$\% = \frac{\text{Rp. 130.227.364,00}}{\text{Rp. 8.806.953.189,00}} \times 100\% = 1,478\%$$

Dibawah ini adalah tabel realisasi penerimaan seluruh Pajak Daerah yang dipungut oleh DPPKA (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset) kabupaten Tanah Datar.

Tabel 4.3
Target dan Realisasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Periode 2011-2015

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	2011	70.434.000	34.119.400
2.	2012	140.000.000	68.496.400
3.	2013	135.000.000	72.139.300
4.	2014	122.035.000	66.262.700
5.	2015	96.250.000	56.827.300

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA) kab. Tanah Datar (Data yang diolah)

Tahap selanjutnya, untuk menentukan besarnya biaya pemungutan pajak reklame dari tahun 2011 sampai tahun 2015 maka total biaya Pajak Daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar dikalikan dengan persentase dari masing-masing tahun yang telah dihitung sebelumnya, hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Biaya Pemungutan Pajak Reklame
Periode 2011-2015

No	Tahun	Total biaya Pajak Daerah (Rp)	Persentase	Biaya Pajak Reklame (Rp)
1.	2011	34.119.400,00	0,797 %	271.931,61
2.	2012	68.496.400,00	1,817 %	1.244.579,58
3.	2013	72.139.300,00	1,346 %	970.994,97
4.	2014	66.262.700,00	1,562 %	1.035.023,37
5.	2015	56,827.300,00	1,478 %	839.907,49

Rasio Efisiensi Pemungutan Pajak Reklame dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:⁹⁰

$$Efisiensi = \frac{\text{Biaya Pemungutan PR}}{\text{Realisasi Penerimaan PR}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah perhitungan Efisiensi Pemungutan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar periode 2011-2015, sebagai berikut:

a. Tahun 2011

$$Efisiensi = \frac{\text{Rp. 271.931,61}}{\text{Rp. 43.098.445,00}} \times 100\% = 0,630 \%$$

b. Tahun 2012

$$Efisiensi = \frac{\text{Rp. 1.244.579,58}}{\text{Rp. 113.693.571,00}} \times 100\% = 1,094 \%$$

⁹⁰Mahmudi, Analisis..., hal.142.

c. Tahun 2013

$$Efisiensi = \frac{\text{Rp. 970.994,97}}{\text{Rp. 92.771.504,00}} \times 100\% = 1,046 \%$$

d. Tahun 2014

$$Efisiensi = \frac{\text{Rp. 1.035.023,37}}{\text{Rp. 123.563.728,00}} \times 100\% = 0,837 \%$$

e. Tahun 2015

$$Efisiensi = \frac{\text{Rp. 839.907,49}}{\text{Rp. 130.227.364,00}} \times 100\% = 0,644 \%$$

Untuk lebih rincinya, maka hasil efisiensi pemungutan pajak reklame Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Efisiensi Pemungutan Pajak Reklame Kabupaten Tanah Datar
Periode tahun 2011-2015

No	Tahun	Biaya (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kriteria Efisiensi
1.	2011	271.931.61	43.098.445,00	0,630	Sangat Efisien
2.	2012	1.244.579,58	113.693.571,00	1,094	Sangat Efisien
3.	2013	970.994,97	92.771.504,00	1,046	Sangat Efisien
4.	2014	1.035.023,37	123.563.728,00	0,837	Sangat Efisien
5.	2015	839.907,49	130.227.364,00	0,644	Sangat Efisien

Sumber: DPPKA (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset) kab. Tanah Datar (Data yang diolah)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi dari pemungutan pajak reklame Kabupaten Tanah Datar setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai tahun 2015 berada dalam kategori sangat efisien. pada tahun 2011 Kabupaten Tanah Datar mengeluarkan biaya pemungutan Pajak Reklame sebesar Rp.271.931,61 sedangkan realisasi penerimaan pajak reklame yang dapat dipungut yaitu sebesar Rp.43.098.445,00 dengan persentase efisiensinya sebesar 0,630 % dan ini termasuk kategori sangat efisien.

Pada tahun 2012, biaya yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA) kabupaten Tanah Datar dalam pemungutan pajak reklame sebesar Rp.1.244.579,58

sedangkan realisasi penerimaan pajak reklame yang dapat dipungut sebesar Rp.113.693.571,00 dengan persentase efisiensinya sebesar 1,094 % dan ini dikategorikan sangat efektif.

Pada tahun 2013, biaya yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar dalam pemungutan pajak reklame sebesar Rp.970.994,97 sedangkan realisasi pemungutan pajak reklame sebesar Rp.92.771.504,00 dengan persentase efisiensinya sebesar 1,046 % dan ini termasuk kategori sangat efisien.

Pada tahun 2014, biaya yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar dalam pemungutan pajak reklame sebesar Rp.1.035.023,37, sedangkan realisasi penerimaan pajak reklame yang terkumpul sebesar Rp.123.563.728,00 dengan tingkat persentase efisiensinya sebesar 0,837 % dan ini dikategorikan sangat efisien.

Pada tahun 2015, biaya yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar dalam pemungutan pajak reklame sebesar Rp.839.907,49, sedangkan realisasi penerimaan pajak reklame yang terkumpul sebesar Rp.130.227.364,00 dengan tingkat persentase efisiensinya sebesar 0,644 % dan ini dikategorikan sangat efisien. Hal ini terjadi karena pemungutan pajak reklame sudah menjadi tugas pokok dari pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar.

3. Analisis Kontribusi

Kontribusi pemungutan pajak reklame yang dimaksudkan disini adalah untuk mengetahui sejauh mana pajak reklame memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD Kabupaten Tanah Datar. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pemungutan pajak reklame maka dilakukan dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak reklame dengan realisasi penerimaan PAD pada periode 2011 sampai tahun 2015. Semakin besar jumlah realisasi penerimaan pajak reklame yang dipungut

oleh pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar berarti semakin besar pula peranan pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Tanah Datar, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak reklame yang dipungut oleh pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar terhadap PAD Kabupaten Tanah Datar juga kecil.

Kontribusi pemungutan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:⁹¹

$$Kontribusi = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PR}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berikut ini adalah perhitungan kontribusi pemungutan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar periode tahun 2011-2015, sebagai berikut:

a. Tahun 2011

$$Kontribusi = \frac{\text{Rp. 43.098.445,00}}{\text{Rp. 60.665.527.232,00}} \times 100\% = 0,071 \%$$

b. Tahun 2012

$$Kontribusi = \frac{\text{Rp. 113.693.571,00}}{\text{Rp. 60.004.818.401,08}} \times 100\% = 0,189 \%$$

c. Tahun 2013

$$Kontribusi = \frac{\text{Rp. 92.771.504,00}}{\text{Rp. 869.463.474.176,28}} \times 100\% = 0,010 \%$$

d. Tahun 2014

$$Kontribusi = \frac{\text{Rp. 123.563.728,00}}{\text{Rp. 1.004.776.405.244,69}} \times 100\% = 0,012 \%$$

e. Tahun 2015

$$Kontribusi = \frac{\text{Rp. 130.227.364,00}}{\text{Rp. 112.072.726.547,89}} \times 100\% = 0,116 \%$$

⁹¹ Mohammad Mahsun, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.2013), hal.153.

Untuk lebih rincinya, maka hasil Kontribusi pemungutan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6
Kontribusi Pemungutan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar
Periode 2011-2015
(Dalam Rupiah)

No	Tahun	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	%	Kriteria Kontribusi
1.	2011	43.098.445,00	60.665.527.232,00	0,071	Sangat Kurang
2.	2012	113.693.571,00	60.004.818.401,08	0,189	Sangat Kurang
3.	2013	92.771.504,00	869.463.474.176,28	0,010	Sangat Kurang
4.	2014	123.563.728,00	1.004.776.405.244,69	0,012	Sangat Kurang
5.	2015	130.227.364,00	112.072.726.547,89	0,116	Sangat Kurang

Sumber: DPPKA (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset) kab. Tanah Datar (Data yang diolah)

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat diketahui persentase kontribusi pemungutan pajak reklame yang dipungut oleh pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2011 sampai tahun 2015 dikategorikan sangat kurang berkontribusi. Pada tahun 2011 persentase kontribusinya sebesar 0,071% dikategorikan dalam skala sangat kurang berkontribusi. Salah satu penyebabnya yaitu disebabkan oleh populasi reklame di Kabupaten Tanah Datar sangat sedikit.

Pada tahun 2012 persentase kontribusinya meningkat dari tahun sebelumnya yaitu dari 0,071% meningkat menjadi 0,189% tetapi masih masuk dalam kategori skala sangat kurang. Walaupun demikian, peningkatan dalam realisasi penerimaan pajak reklame cukup membaik dari tahun sebelumnya, yang mana pada tahun sebelumnya realisasi penerimaan pajak reklame hanya sebesar Rp.43.098.445,00 sedangkan pada tahun 2012 meningkat sebesar Rp.113.693.571,00 sehingga bertambah sebesar Rp.70.595.126,00 dari tahun sebelumnya. hal ini didukung oleh kegigihan pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

Dan Asset (DPPKA) kabupaten Tanah Datar dalam memungut pajak reklame.

Pada tahun 2013 persentase kontribusinya menurun drastis dari tahun sebelumnya dari 0,189% menurun menjadi 0,010% dikategorikan kedalam skala sangat kurang. Dan penerimaan pajak reklame juga menurun yaitu sebesar 20.922.067,00, ini disebabkan karena target penerimaan pajak meningkat dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2014 kontribusi pemungutan pajak reklame sebesar 0,012% dikategorikan kedalam skala sangat kurang. peningkatan dalam realisasi penerimaan pajak reklame bertambah sebesar 30.792.224,00, ini disebabkan karena target penerimaan pajak meningkat dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2015 kontribusi pemungutan pajak reklame sebesar 0,11% dikategorikan kedalam skala sangat kurang. Peningkatan dalam realisasi penerimaan pajak reklame bertambah sebesar 6.663.636,00, ini disebabkan karena target penerimaan pajak meningkat dari tahun sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melihat efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak reklame serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pemungutan pajak reklame Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2011 sampai tahun 2015 cenderung tergolong tidak efektif tetapi ada juga sangat efektif . pada tahun 2011 tergolong ke dalam skala Tidak Efektif sebesar 36,91%, pada tahun 2012 tergolong ke dalam skala Cukup Efektif sebesar 89,11%, pada tahun 2013 tergolong ke dalam skala Tidak Efektif sebesar 57,05%, pada tahun 2014 tergolong ke dalam skala Tidak Efektif sebesar 49,77, dan terakhir pada tahun 2015 tergolong ke dalam skala Sangat Efektif. Terjadinya ketidakefektifan pada tahun 2011, 2013,2014 disebabkan oleh faktor kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar kewajibannya, dan pemungut pajak reklame masih kurang optimal dalam melakukan kinerjanya serta pihak-pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar terlalu tinggi membuat target seperti yang terjadi pada tahun 2014 sehingga petugas pemungut pajak reklame kewalahan untuk mengejar target yang sudah ditetapkan.
2. Dapat diketahui efisiensi pemungutan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2011 hingga tahun 2015 tergolong ke dalam skala Sangat Efisien, dan persentasenya berturut-turut adalah 0,630%, 1,094%, 1,046%, 0,837%, 0,644%. Hal ini terjadi karena pemungutan pajak reklame sudah menjadi salah satu tugas pokok dari bidang penagihan dan bentuk gaji

yang diberikan kepada petugas pemungutan pajak reklame diberikan dalam bentuk gaji bulanan, sehingga pada saat kegiatan pemungutan pajak reklame yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar khususnya pada bidang penagihan akan dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan karena gaji mereka sudah ditetapkan sebelumnya.

3. Dapat diketahui kontribusi pemungutan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2011 sampai tahun 2015 tergolong ke dalam skala sangat kurang berkontribusi dan persentasenya berturut-turut adalah 0,071%, 0,189%, 0,010%, 0,012%, 0,116%.

B. Saran

Penulis menyadari penelitian ini juga tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan Penulis, namun penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar dan pihak lain yang membutuhkan. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas, maka direkomendasikan beberapa saran, diantaranya:

1. DPPKA Kabupaten Tanah Datar perlu memperhatikan dan mengevaluasi penetapan target yang ternyata sangat berpengaruh terhadap tingkat efektifitas pemungutan pajak reklame,sebaiknya target yang ditentukan jangan terlalu tinggi.
2. Lebih ditingkatkan lagi fungsi kontrol pemerintah terhadap instansi terkait demi terciptanya kinerja yang semakin baik sehingga tahun-tahun selanjutnya dapat memberikan hasil yang memuaskan.
3. Melaksanakan penyuluhan secara berkala kepada Wajib Pajak khususnya,dan masyarakat pada umumnya agar dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

4. Dan memberikan sanksi tegas kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.
5. Melakukan pendataan ulang bagi setiap wajib pajak yang lebih akurat agar penerimaan pajak reklame dapat diperoleh secara maksimal dan bisa meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar melalui pemungutan Pajak Reklame.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Aldo. "Hubungan Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Studi Kasus: Kota Manado periode 2005-2011)". *Jurnal EMBA*. Vol.1 No.3. (Juni 2013).
- Bastian, Indra. 2006 *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga.
- Basri, Faisal et. al. 2009. *Lanskap Ekonomi Indonesia: Kajian dan Renungan terhadap Masalah-Masalah Struktural, Transformasi Baru dan Prospek Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Deddi, Nordiawan, et. al. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. (Jakarta: Selemba Empat).
- Diana, Ilfi Nur. *Hadist-hadist Ekonomi*. 2012. Malang: UIN Maliki Press.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariat- Edisi Revisi*. Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasil Wawancara. 18 Oktober 2016 dengan Bapak Azwardi (Seksi Data Legalisasi dan Pengkajian Pendapatan).
- Hasil Wawancara. 24 Januari 2017 dengan ibuk Anike Deswira (Seksi Pembukuan dan Verifikasi).
- Kustiyah, Eny, Suryani. "Efektivitas Pajak Reklame terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta". *Jurnal Paradigma* .Vol. 12. No. 02, (Agustus 2014 – Januari 2015).
- Khairunnisa. "Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus: Kota Bandung)." *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. Vol. 22 No.3. (Desember 2011).
- Lengkong, Triski Intan Meylani et. al, "Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame di Kota Bitung". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol.15 No. 04. (2015).
- Mardiasmo. 2009. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- . 2011. *Perpajakan: Edisi Revisi Tahun 2011*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Muindro, Renyowijoyo. 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Mahmudi, 2010 *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- , 2015 *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- , 2016 *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Ketiga*, Yogyakarta: STIM YKPN.
- Midiyati, Meilyna Nur. “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Reklame serta Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus pada DPKAD Kota Semarang)”. *Jurnal Penelitian*. (2015).
- Mosal, Mourin. M. “Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan dikota Manado”. *Jurnal EMBA* .Vol.1 No.4 (Desember 2013).
- Nuryaman. 2015. *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suhartono, Rudy, Wirawan B Ilyas. 2011. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Bupati tahun 2012 tentang Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Pemasangan Reklame serta Nilai Perolehan Air Tanah.
- Pawiloi, Andi Mahyudin. *Analisis Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar*. Skripsi. 2014.
- Ridwan. “Kontribusi Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan.” *Jurnal Administrasi Negara*. Vol 1. No 02. (2013).
- Rori, Handro. “Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Reklame di Kota Manado.” *Jurnal EMBA*. Vol.1 No.3 (Juni 2013).
- Ratdianto, Adhika dkk. “Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus DPKAD Proboling)”, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol 8 No 1 2016.
- Sripradita, Nio Anggun et. al. “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri)”. *Jurnal-e Perpajakan.*, vol. 1 no. 1. (2014).

- Saddam. *Intensifikasi Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Tahun 2009-2012*. Skripsi. 2014.
- Sukardi. 2012. *Metodologi penelitian akuntansi*. Jakarta : Erlangga.
- Utomo, Dwiwarso, et al. 2011. *Perpajakan Aplikasi dan Terapannya*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Wahyuni, Tri. “Tingkat Efektivitas Efisiensi Penghasilan Pajak Daerah Beserta Peran serta terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang (2010-2013). “*Jurnal Penelitian*”. (2015).
- Yan Yan, et. al.”Analisis Peranan dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi” ,*Jurnal Penelitian*.
- Yulianti Rini (dkk).2017. *Profil Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah: DPPKA Kabupaten Tanah Datar*.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl. Sudirman No.137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213, Telp. (0752) 71150, Ext 135, Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail: data.p3m@gmail.com

08 Desember 2016

Nomor : B- 107 /In.27/L.I/TL.00/ 12 /2016
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Rangkap
Perihal : **Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian**

Yth. Bupati Tanah Datar
Up. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Tanah Datar
Batusangkar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : Putri Auly / 12231011
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Rumbai, 11 September 1993
Nomor Induk Keluarga : KTP. 1304075109930001
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Alamat : Jorong Taratak Indah Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar

akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan laporan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian : **Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Reklame serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar (Studi Kasus pada DPPKA Kabupaten Tanah Datar)**

Lokasi : Kantor DPPKA Kabupaten Tanah Datar
Waktu : 09 Desember 2016 s.d 09 Februari 2017
Dosen Pembimbing 1 : Nasfizar Guspendri, SE., M.Si.
Dosen Pembimbing 2 : Desy Farina, SE., M.Si.

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan menerbitkan surat izin penelitian dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas bantuannya diucapkan terimakasih.

Ketua,



Yusrizal Efendi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197308191998031001

Tembusan:

1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar.



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)**

Jln. MT. Haryono No. 10Telp. (0752) 574400 Batusangkar 27281

**SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI
Nomor : 070/1003 /KESBANGPOL/2016**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan surat Ketua LPPM IAIN Batusangkar Nomor : B-107/In-27/LI/TL.00/12/2016, tanggal 14 Desember 2016, perihal Mohon Izin Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh

Nama : **PUTRI AULY**
Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Rambai 11 September 1993
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jorong Taratak Indah , Sungayang
Kartu Identitas : NIK. 130407510930001
Maksud dan Obyek : Izin Penelitian
Judul : " **ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME SERTA KONTRIBUSI TEHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR (STUDI KASUS DPPKA KABUPATEN TANAH DATAR)**"
Lokasi Penelitian : Kantor DPPKA Kabupaten Tanah Datar
W a k t u : 14 Desember 2016 s.d 14 Februari 2017
Anggota : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan Penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat - istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai tanggal 14 Desember 2016 s.d 14 Februari 2017.
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikianlah surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 14 Desember 2016,

KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR,


IRWAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19670617 198903 1 007

Tembusan

- Yth.:
1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)
 2. Dandim 0307 Tanah Datar di Pagaruyung.
 3. Kapolres Tanah Datar di Pagaruyung.
 4. Dinas DPPKA Kabupaten Tanah Datar di Pagaruyung.
 5. Ketua LPPM IAIN Batusangkar di Batusangkar.
 6. Yang bersangkutan....



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung Telp. (0752) 71160, Fax. 71160
BATUSANGKAR

SURAT KETERANGAN

Nomor: 900 / 175 /BKD-2017

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar menerangkan bahwa :

Nama : **PUTRI AULY**
Tempat/ Tgl Lahir : Sungai Rambai, 11 September 1993
NIK : 12 231 011
Pekerjaan : Mahasiswi
Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Jorong Taratak Indah, Sungayang

Telah melakukan Penelitian pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Tanggal 14 Desember 2016 s.d 14 Februari 2017 dengan judul "**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME SERTA KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR (STUDI KASUS DPPKA KABUPATEN TANAH DATAR)**".

Demikianlah surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 14 Februari 2017

An. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



DAFTAR TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAD 2011
KEADAAN S/D 30 DESEMBER 2011

No	DINAS / INSTANSI	TARGET 2011 PERUBAHAN	REALISASI PENERIMAAN		JUMLAH e/d Desember 2011	%
			Bulan Nov 2011	Bulan Des 2011		
1	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	36.290.625.999,37	33.767.574.752,00	3.840.683.630,00	37.608.268.382,00	106,67
	- Pajak Hotel	37.019.407,97	20.946.625,00	11.626.051,00	32.572.676,00	87,99
	- Pajak Restoran	611.318.900,00	451.353.775,00	197.296.371,00	648.650.146,00	106,11
	- Pajak Hiburan	4.470.940,80	1.400.000,00	-	1.400.000,00	31,31
	- Pajak Reklame	116.770.376,40	35.451.545,00	7.646.900,00	43.098.445,00	36,91
	- Pajak Penerangan Jalan	3.602.557.553,00	2.940.944.415,00	1.524.089.265,00	4.465.033.680,00	123,94
	- Pajak Pengambilan Gallan Golongan C	289.319.341,20	138.956.473,00	74.045.127,00	213.001.600,00	73,62
	- Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	400.000.000,00	5.700.000,00	28.716.000,00	34.418.000,00	8,60
	- Pajak Air Tanah	47.000.000,00	-	-	-	0,00
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	22.354.066.118,40	22.377.562.463,00	10.000.000,00	22.387.562.463,00	100,16
	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	22.138.226.342,40	22.096.748.957,00	10.000.000,00	22.106.748.957,00	99,86
	- Perusahaan Tuah Sepakat	41.477.385,40	-	10.000.000,00	10.000.000,00	24,11
	- BUMD	22.096.748.957,00	22.096.748.957,00	-	22.096.748.957,00	100,00
	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta	215.836.776,00	280.833.596,00	-	280.833.596,00	130,11
	- Lain-lain PAD Yang Sah	7.828.003.361,60	7.796.238.456,00	1.987.271.916,00	9.782.611.372,00	124,97
	1. Penerimaan Jasa Giro	3.198.452.162,40	2.632.816.182,00	180.196.141,00	2.813.012.323,00	87,96
	- Jasa Giro Kas Daerah	3.198.452.162,40	2.632.816.182,00	180.196.141,00	2.813.012.323,00	87,96
	2. Pendapatan Bunga Deposito	4.545.529.161,20	4.065.616.784,00	644.713.008,00	4.710.329.772,00	103,63
	- Deposito Pada Bank Nagari	4.280.835.466,00	3.823.842.215,00	618.206.682,00	4.442.048.897,00	103,77
	- Deposito Pada BPR	264.693.695,20	241.774.569,00	26.506.326,00	268.279.875,00	101,28
	3. Penerimaan Lain-lain	84.022.038,00	3.133.000,00	-	3.133.000,00	3,73
	- Perusahaan Tuah Sepakat	-	-	-	-	0,00
	- DPPKA	84.022.038,00	3.133.000,00	-	3.133.000,00	3,73
	4. Penerimaan Lain-lain (Temuan, Denda, LHP, Dll)	PM	1.093.674.510,00	1.162.362.767,00	2.256.037.277,00	-
2	Kantor Lingkungan Hidup	149.900.000,00	105.465.200,00	25.583.300,00	131.048.500,00	87,42
	- Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	149.900.000,00	105.465.200,00	25.583.300,00	131.048.500,00	87,42
3	Rumah Sakit Umum Daerah	11.390.863.928,96	8.274.006.955,00	2.090.095.247,00	10.364.102.202,00	90,99
	- Pendapatan BLUD	11.390.863.928,96	8.274.006.955,00	2.090.095.247,00	10.364.102.202,00	90,99
4	Dinas Peternakan dan Perikanan	169.788.000,00	413.206.000,00	200.708.500,00	613.913.500,00	361,58
	- Retribusi Pasar / Grosir	99.008.000,00	110.348.000,00	11.726.000,00	122.074.000,00	123,30
	- Retribusi Rumah Potong Hewan	70.780.000,00	53.270.500,00	5.325.000,00	58.595.500,00	82,79
	- Penerimaan Lain-lain	-	249.588.500,00	183.657.500,00	433.246.000,00	100,00
5	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	356.099.000,00	391.397.100,00	45.675.500,00	437.072.600,00	122,74
	- Retribusi Parkir	28.800.000,00	27.510.000,00	5.185.000,00	32.695.000,00	113,52
	- Retribusi Penguji Kendaraan Bermotor	291.575.000,00	283.907.000,00	28.100.500,00	312.007.500,00	107,01
	- Retribusi Terminal	30.648.000,00	25.360.000,00	2.705.000,00	28.065.000,00	91,57
	- Retribusi Izin Trayek	5.076.000,00	4.970.100,00	215.000,00	5.185.100,00	102,15
	- Penerimaan Lain-lain	-	49.650.000,00	9.470.000,00	59.120.000,00	100,00
6	Dinas Pekerjaan Umum	33.000.000,00	107.575.500,00	27.886.500,00	135.462.000,00	410,49
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	33.000.000,00	107.575.500,00	27.886.500,00	135.462.000,00	410,49
7	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan & Pasar	392.296.500,00	430.596.430,00	69.318.020,00	499.913.450,00	124,88
	- Retribusi Pelayanan Pasar	379.716.500,00	396.816.430,00	52.528.020,00	449.344.450,00	118,34
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.580.000,00	1.860.000,00	90.000,00	1.950.000,00	75,58
	- Retribusi Pasar Grosir / Perbaikan	10.000.000,00	17.328.000,00	6.000.000,00	23.328.000,00	233,28
	- Retribusi Rumah Potong Hewan	-	1.325.000,00	-	1.325.000,00	100,00
	- Penerimaan Lain-lain	-	13.266.000,00	700.000,00	13.966.000,00	100,00
8	Dinas Kesehatan	3.314.017.200,00	852.377.143,00	291.950.094,00	1.144.327.237,00	34,53
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.314.017.200,00	852.377.143,00	291.950.094,00	1.144.327.237,00	34,53
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	255.000.000,00	234.493.500,00	153.504.000,00	387.997.500,00	152,16
	- Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	255.000.000,00	234.493.500,00	153.504.000,00	387.997.500,00	152,16
10	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)	305.460.835,00	288.191.465,00	38.667.830,00	326.859.295,00	108,81
	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	147.140.575,00	128.594.225,00	33.402.330,00	161.996.555,00	110,10
	- Retribusi Gangguan / HD	158.320.260,00	157.618.240,00	4.665.500,00	162.283.740,00	102,50
	- Retribusi Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	-	1.969.000,00	-	1.969.000,00	100,00
11	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	34.020.000,00	16.450.000,00	7.300.000,00	23.750.000,00	69,81
	- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	34.020.000,00	16.450.000,00	7.300.000,00	23.750.000,00	69,81
12	Sekretariat Daerah	132.216.226,00	300.592.627,00	6.885.000,00	307.477.627,00	232,96
	- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Bag Dalbang)	-	-	735.000,00	735.000,00	100,00
	- Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah (Bagian Umum)	87.168.000,00	105.489.700,00	6.150.000,00	111.639.700,00	128,07
	- Angsuran/Cicilan Penjualan kendaraan (Bagian Umum)	45.047.226,00	195.102.927,00	-	195.102.927,00	433,11
	J U M L A H	51.823.186.687,33	45.181.917.672,00	6.787.667.621,00	51.969.585.293,00	100,28
	UYHD	365.013.585,00	8.300.928.344,00	8.300.928.344,00	8.695.941.938,00	100,00
		51.823.186.687,33	45.173.616.328,00	15.088.595.965,00	60.665.527.232,00	

Batusangkar, Januari 2012
KEPALA DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KAB. TANAH DATAR
DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET
ALI NURSAL NOER, SE.MM.AKT
NIP. 196302051993031003
TANAH DATAR

DAFTAR TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAD 2012
KEADAAN S/D 31 DESEMBER 2012

No	DINAS / INSTANSI	TARGET	REALISASI PENERIMAAN		JUNJAH	%
		PERUBAHAN 2012	s/d November	Desember	s/d 31 Des 2012	
1	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	33.856.441.255,00	33.728.208.819,53	1.841.453.977,00	35.869.862.795,53	105,06
	- Pajak Hotel	78.893.686,00	89.422.542,00	5.349.006,00	94.771.548,00	123,25
	- Pajak Restoran	712.738.159,00	441.845.940,00	324.168.081,00	766.014.021,00	107,47
	- Pajak Hiburan	16.250.000,00	6.867.100,00	-	6.867.100,00	42,26
	- Pajak Reklame	127.583.985,00	95.491.771,00	18.201.800,00	113.693.571,00	89,11
	- Pajak Penerangan Jalan	4.557.233.600,00	4.364.152.465,00	440.889.798,00	4.805.042.263,00	105,44
	- Pajak Parkir	5.000.000,00	-	-	-	0,00
	- Pajak Air Tanah	60.000.000,00	74.316.517,00	11.283.896,00	85.600.413,00	142,67
	- Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-	0,00
	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	319.043.750,00	269.909.080,00	112.207.758,00	382.116.838,00	119,77
	- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	210.000.000,00	309.479.000,00	248.716.250,00	558.195.250,00	265,81
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Daerah/BUMD	21.195.440.225,00	20.834.813.511,00	-	20.834.813.511,00	98,30
	- Perusda Tuah Sepakat	21.010.908.719,00	20.639.849.136,00	-	20.639.849.136,00	98,23
	- BUMD	371.060.583,00	-	-	-	0,00
	- BUMD	20.639.849.136,00	20.639.849.136,00	-	20.639.849.136,00	100,00
	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta	184.530.516,00	194.764.375,00	-	194.764.375,00	105,55
	- Bagian Laba Pada BPR	184.530.516,00	194.764.375,00	-	194.764.375,00	105,55
	Lain-lain PAD Yang Sah	6.576.257.840,00	7.242.110.892,53	680.637.368,00	7.922.748.260,53	120,48
	1. Penerimaan Jasa Giro	3.094.802.447,00	2.915.910.210,00	229.060.859,00	3.144.971.069,00	101,62
	- Jasa Giro Kas Daerah	3.094.802.447,00	2.915.910.210,00	229.060.859,00	3.144.971.069,00	101,62
	2. Pendapatan Bunga Deposito	3.481.455.393,00	3.530.865.392,00	418.211.329,00	3.949.296.721,00	113,41
	- Deposito Pada Bank Nagari	3.375.000.000,00	3.341.162.077,00	403.304.995,00	3.744.467.072,00	110,95
	- Deposito Pada BPR	106.455.393,00	188.923.315,00	14.906.334,00	203.829.649,00	191,47
	3. Penerimaan Lain-lain (Temuan, Denda, LHP, Dll)	PM	796.115.290,53	33.365.200,00	829.480.490,53	100,00
2	Kantor Lingkungan Hidup	211.470.000,00	113.906.548,00	32.261.500,00	146.168.048,00	69,12
	- Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	181.470.000,00	113.906.548,00	32.261.500,00	146.168.048,00	80,55
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	30.000.000,00	-	-	-	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	13.449.900.000,00	11.017.632.822,00	1.554.230.322,00	12.571.863.144,00	93,47
	- Pendapatan BLUD	13.449.900.000,00	11.017.632.822,00	1.554.230.322,00	12.571.863.144,00	93,47
4	Dinas Peternakan dan Perikanan	317.600.000,00	362.612.000,00	65.631.000,00	428.243.000,00	134,84
	- Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan	175.760.000,00	221.175.000,00	17.060.000,00	238.235.000,00	135,55
	- Retribusi Rumah Potong Hewan	141.840.000,00	120.802.000,00	17.145.000,00	137.947.000,00	97,26
	- Penerimaan Lain-lain	20.000.000,00	20.635.000,00	31.426.000,00	52.061.000,00	100,00
5	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	575.270.000,00	530.997.360,00	419.153.959,00	950.151.319,00	165,17
	- Retribusi Parkir	70.080.000,00	30.955.000,00	16.310.000,00	47.265.000,00	67,44
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	318.720.000,00	315.055.200,00	26.592.800,00	341.648.000,00	107,19
	- Retribusi Menara Telekomunikasi	77.000.000,00	117.107.160,00	353.791.159,00	470.898.319,00	611,56
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	43.565.000,00	28.670.000,00	16.695.000,00	45.365.000,00	104,13
	- Retribusi Terminal	39.330.000,00	28.825.000,00	5.140.000,00	33.965.000,00	86,36
	- Retribusi Izin Trayek	28.575.000,00	10.385.000,00	625.000,00	11.010.000,00	41,43
6	Dinas Pekerjaan Umum	260.000.000,00	187.353.500,00	16.281.500,00	203.635.000,00	78,32
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	260.000.000,00	187.353.500,00	16.281.500,00	203.635.000,00	78,32
7	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Pasar	829.823.000,00	469.549.820,00	56.855.170,00	526.404.990,00	63,32
	- Retribusi Pelayanan Pasar	626.340.000,00	435.372.600,00	38.626.930,00	473.999.530,00	75,68
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	12.829.400,00	480.000,00	-	480.000,00	3,74
	- Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan	190.653.600,00	33.697.220,00	17.228.240,00	50.925.460,00	26,71
8	Dinas Kesehatan	2.836.100.000,00	1.625.040.036,00	609.981.380,00	2.235.021.416,00	78,81
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.836.100.000,00	1.625.040.036,00	609.981.380,00	2.235.021.416,00	78,81
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	75.000.000,00	20.883.000,00	22.560.000,00	43.243.000,00	57,66
	- Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	75.000.000,00	20.883.000,00	22.560.000,00	43.243.000,00	57,66
10	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)	195.000.000,00	328.188.910,60	38.236.178,76	366.425.089,35	187,91
	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	65.000.000,00	157.276.445,60	3.800.078,75	161.076.524,35	247,81
	- Retribusi Gangguan / HO	130.000.000,00	170.910.465,00	34.436.100,00	205.346.565,00	157,96
11	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	200.750.000,00	64.836.000,00	12.325.000,00	77.161.000,00	38,44
	- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	200.750.000,00	64.836.000,00	12.325.000,00	77.161.000,00	38,44
12	Sekretariat Daerah	222.309.876,00	83.301.560,00	2.300.000,00	85.601.560,00	38,51
	- Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah (Bagian Umum)	177.262.452,00	52.421.560,00	2.300.000,00	54.721.560,00	30,87
	- Angsuran/Cicilan Penjualan kendaraan (Bagian Umum)	45.047.226,00	30.880.000,00	-	30.880.000,00	68,55
	J U M L A H	53.029.663.933,00	48.532.308.375,13	4.670.269.986,75	53.202.578.361,88	100,33
	UYHD		541.618.019,00	6.260.622.021,00	6.802.240.040,00	
		53.029.663.933,00	49.073.926.394,13	10.930.892.007,75	60.004.818.401,88	



KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2013
KEMDAN BULAN DESEMBER 2013

KODE REKENING	URAIAN	APBDP 2013	REALISASI PENERIMAAN		Jumlah	%	Ket
			November	Desember			
4 1 1 01	Pendapatan Daerah	63.106.402.075,46	66.647.721.894,28	5.556.686.875,00	62.186.520.489,28	98,86	
4 1 1 01 01	Pajak Daerah	8.774.156.546,00	8.292.629.729,83	1.807.286.524,00	7.889.136.653,53	89,02	
4 1 1 01 01 05	Pajak Hotel	202.202.180,00	206.620.428,00	42.139.500,00	103.179.245,00	48,84	
4 1 1 01 01 05 01	Hotel Bintang Dua	38.880.000,00	38.554.546,00	15.880.000,00	54.434.546,00	140,01	
4 1 1 02 01	Pajak Restoran	807.806.000,00	807.202.438,00	287.406.523,00	834.608.987,00	103,82	
4 1 1 02 01 02	Restoran	489.518.000,00	486.634.080,00	4.086.500,00	207.308.850,00	41,86	
4 1 1 02 02	Rumahan Makan	759.068.000,00	658.368.558,00	263.308.923,00	633.679.287,00	110,00	
4 1 1 03	Pajak Hiburan	21.700.000,00	1.721.100,00	0,00	1.221.100,00	7,83	
4 1 1 03 15	Pecutan Kuda	3.000.000,00	821.100,00	0,00	821.100,00	27,37	
4 1 1 03 15 01	Pernaman Kelengkapan	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 03 17	Mantri Ulas/Span	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 03 19	Pusat Keagamaan	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 03 19 01	Peningkatan Cahaya	4.800.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	20,00	
4 1 1 04	Pajak Reklame	162.673.839,00	80.731.635,00	12.039.869,00	92.171.664,00	57,05	
4 1 1 04 01	Reklame Papan/Bill Board/Video/Melegtron	146.013.711,00	70.470.535,00	12.039.869,00	82.510.404,00	56,51	
4 1 1 04 02	Reklame Kain	15.861.119,00	10.261.100,00	0,00	10.261.100,00	64,89	
4 1 1 04 05	Reklame Berjalan	751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 05 01	Pajak Penanginan Jalan P/LN	5.066.618.181,00	4.726.637.049,00	482.874.088,00	5.209.511.137,00	102,82	
4 1 1 05 01 01	Pajak Pakir	12.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 05 01 05	Pajak Pakir	12.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 06 01	Pajak Air Tanah	134.133.720,00	146.376.892,00	19.967.482,00	166.333.984,00	123,26	
4 1 1 07 01	Pajak Air Tanah	134.133.720,00	146.376.892,00	19.967.482,00	166.333.984,00	123,26	
4 1 1 09 06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	328.418.750,00	273.906.949,83	181.506.413,00	481.413.362,83	140,50	
4 1 1 09 06 01	Manmor	79.662.500,00	128.974.143,83	110.487.188,00	240.461.331,93	301,47	
4 1 1 09 07	Pajak/Retribusi	236.500.000,00	112.143.146,00	53.580.991,00	165.724.137,00	70,07	
4 1 1 09 08	Grand/Andal/Batu Baku	4.500.000,00	37.789.660,00	17.438.234,00	55.227.894,00	1.227,29	
4 1 1 09 09	Tanah Liat	1.772.413.000,00	22.376.307,00	484.029.793,00	506.408.100,00	28,57	
4 1 1 10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	75.545.846,00	22.376.307,00	484.029.793,00	506.408.100,00	672,11	
4 1 1 10 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan	1.697.667.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	280.000.000,00	381.937.500,00	112.315.750,00	504.253.250,00	183,94	
4 1 1 11 01	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	280.000.000,00	381.937.500,00	112.315.750,00	504.253.250,00	183,94	

KODE REKENING	1	2	3	REALISASI PEREMAMAN		6	7	8
				4	5			
		UAIAN	APBD-P 2013	November	Desember	Jumlah	%	Ket
4 1 2 01		Retribusi Daerah	7.244.850.212,00	5.523.850.755,28	1.144.117.873,00	6.868.068.628,28	92,00	
4 1 2 01 01		Retribusi Jasa Umum	5.612.377.462,00	4.133.626.285,00	4.889.807.175,00	4.633.433.460,00	84,06	
4 1 2 01 01 01		Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.892.697.062,00	2.500.160.140,00	2.910.614.740,00	2.740.754.880,00	74,83	
4 1 2 01 01 01 02		Retribusi Pelayanan Pemukiman/Kebudayaan	282.520.000,00	142.482.500,00	20.874.000,00	163.356.500,00	55,94	
4 1 2 01 01 01 03		Retribusi Pelayanan Bazar KIP dan Ate Carian, Sipi	149.715.000,00	283.015.000,00	24.505.000,00	307.520.000,00	205,40	
4 1 2 01 01 01 05		Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	89.060.000,00	49.070.000,00	49.070.000,00	70.500.000,00	78,16	
4 1 2 01 01 06		Retribusi Pelayanan Pasar	689.740.400,00	490.849.270,00	60.193.490,00	551.042.760,00	79,89	
4 1 2 01 01 07		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	351.990.000,00	340.558.600,00	35.899.200,00	376.457.800,00	107,14	
4 1 2 01 01 08		Retribusi Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran	2.280.000,00	2.955.000,00	45.000,00	2.640.000,00	115,79	
4 1 2 01 01 09		Retribusi Pengkajian Biaya Cetak Peta	1.975.000,00	4.095.000,00	480.000,00	4.575.000,00	244,00	
4 1 2 01 01 11		Retribusi Penyediaan dan/atau penyediaan kelas	9.240.000,00	12.840.000,00		12.840.000,00	140,04	
4 1 2 01 01 13		Retribusi Mena Telemekunasi	254.000.000,00	307.970.775,00	95.765.745,00	403.636.520,00	152,69	
4 1 2 02 01		Retribusi Jasa Usaha	1.399.948.790,00	747.182.220,00	652.964.960,00	1.329.847.180,00	101,69	
4 1 2 02 01 01		Retribusi Pemakaian Keayaan Daerah	846.437.150,00	394.512.500,00	278.434.740,00	673.947.240,00	79,62	
4 1 2 02 01 02		Retribusi Pasar Grosir/Perkotaan	190.653.600,00	159.861.720,00	33.882.220,00	193.743.940,00	101,62	
4 1 2 02 01 04		Retribusi Rantai Pedagang Hewan	146.750.000,00	113.510.000,00	10.005.000,00	123.515.000,00	84,18	
4 1 2 02 02 09		Retribusi Tempat Rekreasai dan Olahraga	93.500.000,00	51.148.000,00	254.259.000,00	305.407.000,00	326,64	
4 1 2 03 01		Retribusi Perchtan Terentu	423.290.000,00	643.142.280,28	56.845.738,00	701.787.989,28	166,81	
4 1 2 03 01 01		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	200.000.000,00	282.324.830,28	21.797.988,00	304.122.518,28	152,06	
4 1 2 03 01 03		Retribusi Izin Gangukuan/Kemaman	210.000.000,00	354.907.420,00	21.797.988,00	387.995.470,00	184,74	
4 1 2 03 04		Retribusi Izin Trayek	13.290.000,00	5.970.000,00	3.800.000,00	9.770.000,00	73,28	
4 1 3 01		Hasil Peng. Keayaan Daerah Yg Dipisahkan	24.378.899.971,46	23.528.353.121,00	0,00	23.528.353.121,00	96,82	
4 1 3 01 01		Bgn. Laba atas Peny. Modal Pd Peny. MK Daerah	24.223.467.835,46	23.370.353.121,00	0,00	23.370.353.121,00	96,48	
4 1 3 01 01 01		Penumbuhan Daerah	880.851.714,46	7.737.000,00	0,00	7.737.000,00	0,80	
4 1 3 01 01 02		BUMD	23.362.616.121,00	23.362.616.121,00	0,00	23.362.616.121,00	100,00	
4 1 3 01 01 03		Bgn. Laba atas Peny. Modal pd Peny. Mlk Swasta	153.432.086,00	157.781.286,00	0,00	157.781.286,00	102,83	
4 1 3 01 01 03 01		Bagian Laba Pada BPR	153.432.086,00	157.781.286,00	0,00	157.781.286,00	102,83	
4 1 4 02		Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	22.710.872.287,00	21.303.127.002,07	2.882.291.789,00	24.105.418.790,07	106,14	
4 1 4 02 01		Penerimaan Jasa Giro	3.859.292.832,00	3.442.581.238,00	10.117.918,00	3.860.418.156,00	91,09	
4 1 4 03		Jasa Giro Kas Daerah	3.859.292.832,00	3.442.581.238,00	10.117.918,00	3.860.418.156,00	91,09	
4 1 4 03 01		Pendapatan Bunga Deposito	4.903.306.199,00	4.409.788.778,00	635.722.507,00	5.045.509.285,00	102,90	
4 1 4 03 01 01		Rakening Deposito Pada Bank Nagari	4.903.306.199,00	4.409.788.778,00	635.722.507,00	5.045.509.285,00	102,90	
4 1 4 13		Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Rumah	51.397.606,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	13,81	
4 1 4 13 02		Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dns Daerah Geogangan III	6.350.390,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	15,76	
4 1 4 15 01		Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perancangan Dinas	45.047.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 4 16 01		Penerimaan Lain-Lain	0,00	970.538.447,07	1.002.700.588,00	1.973.639.035,07	100	
4 1 4 16 01 01		Penerimaan Lain-Lain (Denda/LP/Pl)	0,00	970.538.447,07	1.002.700.588,00	1.973.639.035,07	100	
4 1 4 16 01 02		Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah	13.800.180.000,00	13.473.040.638,00	1.002.710.758,00	13.475.751.396,00	97,65	
4 1 4 16 01 03		Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah	13.800.180.000,00	13.473.040.638,00	1.002.710.758,00	13.475.751.396,00	97,65	

DAFTAR : TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2014
KEADAAN BULAN DESEMBER 2014

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN APBD-P 2014	REALISASI PENERIMAAN		Jumlah	%	Ket
			NOVEMBER	DESEMBER			
1							
4	PENDAPATAN DAERAH	97.329.727,272,00	88.012.162.694,69	11.738.339.147,00	99.790.501.841,69	102,49	
4	PENDAPATAN ASLI DAERAH	12.187.541.468,00	8.015.716.332,00	1.442.519.713,00	9.458.236.045,00	77,61	
4	Pajak Daerah	278.424.120,00	81.896.684,00	1.980.000,00	83.876.684,00	30,38	
4	Pajak Hotel	212.109.120,00	39.145.500,00	812.500,00	39.958.000,00	18,84	
4	Hotel Bintang Dua	63.312.000,00	42.551.184,00	1.187.500,00	43.738.684,00	69,05	
4	Hotel Melati Dua	1.050.000,000,00	593.076.507,00	443.286.118,00	1.036.362.625,00	98,70	
4	Pajak Restoran	86.780.000,00	15.742.770,00	0,00	15.742.770,00	18,15	
4	Restoran	963.240.000,00	577.333.737,00	443.286.118,00	1.020.619.855,00	105,98	
4	Rumahan Makan	25.800.000,00	9.146.200,00	0,00	9.146.200,00	35,45	
4	Pajak Hiburan	5.000.000,00	8.146.200,00	0,00	8.146.200,00	162,92	
4	Pecahan Kuda	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Balap Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Pernaiman Kelengkapan	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Mandi Jaj/Spa	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Pusat Kebudayaan	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Perandingan Olah Raga	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Pajak Reklame	248.292.410,00	99.420.143,00	24.143.585,00	123.563.728,00	49,77	
4	Reklame Papan/Bill Board/Video/otron/Megatron	226.250.000,00	95.401.983,00	23.643.685,00	119.045.668,00	52,62	
4	Reklame Kam	15.961.000,00	4.018.160,00	499.920,00	4.518.080,00	28,31	
4	Reklame Melekat/Siker	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Reklame Selebaran	1.387.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Reklame Berjalan	974.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Pajak Penempatan Jalan	7.112.972.410,00	5.410.480.435,00	516.494.806,00	5.926.985.241,00	83,31	
4	Pajak Penempatan Jalan PLN	7.112.972.410,00	5.410.480.435,00	516.494.806,00	5.926.985.241,00	83,31	
4	Pajak Parkir	12.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Pajak Parkir	12.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Pajak Air Tanah	158.714.458,00	121.273.199,00	11.448.033,00	132.721.232,00	83,62	
4	Pajak Air Bawah Tanah	158.714.458,00	121.273.199,00	11.448.033,00	132.721.232,00	83,62	
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	440.948.000,00	407.090.280,00	188.567.285,00	595.657.565,00	135,09	
4	Marmer	98.437.000,00	71.975.225,00	0,00	71.975.225,00	73,12	
4	Pasir/Kerikil	119.125.000,00	132.813.245,00	0,00	212.312.215,00	178,23	
4	Granit/Andasit/Batu Beku	183.562.000,00	145.662.742,00	74.028.319,00	219.691.061,00	119,89	
4	Tanah Liat	39.825.000,00	56.539.066,00	35.141.986,00	91.681.054,00	230,21	
4	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2.233.008.088,00	1.000.483.287,00	240.249.896,00	1.240.733.173,00	55,56	
4	Baa Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2.233.008.088,00	1.000.483.287,00	240.249.896,00	1.240.733.173,00	55,56	
4	Baa Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	630.000.000,00	293.039.600,00	17.350.000,00	310.389.600,00	49,27	
4	Baa Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	630.000.000,00	293.039.600,00	17.350.000,00	310.389.600,00	49,27	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN APBD-P 2014		REALISASI PEMERINTAH		Jumlah	%	Ket
		3	4	5	6			
			NOVEMBER	DESEMBER				
4 1 2 01	Retribusi Daerah	11.719.184.470,00	10.419.128.653,00	1.220.651.331,00	11.639.779.984,00	99,32		
4 1 2 01 01	Retribusi Jasa Umum	7.737.133.430,00	6.767.366.019,00	697.747.240,00	7.465.113.859,00	96,48		
4 1 2 01 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.748.706.030,00	4.611.056.000,00	552.392.000,00	5.163.448.000,00	89,82		
4 1 2 01 01 03	Retribusi Penggantian Biaya KTR dan Ake Catatan Sipil	350.000.000,00	184.759.000,00	40.185.500,00	224.944.000,00	64,28		
4 1 2 01 01 05	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	23.405.000,00	23.405.000,00	0,00	23.405.000,00	100,00		
4 1 2 01 06	Retribusi Pelayanan Pasar	50.510.000,00	50.510.000,00	0,00	50.510.000,00	100,00		
4 1 2 01 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	704.196.400,00	692.196.400,00	48.472.840,00	740.669.240,00	105,18		
4 1 2 01 08	Retribusi Penggantian Alat Pemadam Keakrakan	376.800.000,00	354.447.800,00	39.908.000,00	394.355.800,00	104,66		
4 1 2 01 09	Retribusi Penggantian Biaya Cek Pelai	3.320.000,00	3.095.000,00	0,00	3.095.000,00	93,22		
4 1 2 01 10	Retribusi Penyediaan dan/atau pemeliharaan kelas	5.760.000,00	2.520.000,00	240.000,00	2.760.000,00	47,92		
4 1 2 01 11	Retribusi Pelayanan Telekomunikasi	12.000.000,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	36,67		
4 1 2 01 13	Retribusi Menara Telekomunikasi	450.000.000,00	840.940.819,00	0,00	840.940.819,00	186,88		
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	3.478.051.040,00	3.066.168.824,00	482.094.240,00	3.548.263.064,00	101,44		
4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.037.961.040,00	573.635.314,00	112.980.000,00	686.625.314,00	66,15		
4 1 2 02 02	Retribusi Pasar Grosir/Perkotaan	200.000.000,00	236.890.010,00	18.732.240,00	255.622.250,00	127,81		
4 1 2 02 04	Retribusi Terminal	33.480.000,00	26.528.000,00	6.120.000,00	32.648.000,00	97,57		
4 1 2 02 07	Retribusi Rumah Potong Hewan	149.880.000,00	103.105.000,00	8.920.000,00	112.025.000,00	74,74		
4 1 2 02 10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.056.750.000,00	2.126.011.500,00	315.332.000,00	2.441.343.500,00	118,70		
4 1 2 03	Retribusi Perizinan Terentu	504.000.000,00	585.592.820,00	60.809.251,00	646.402.071,00	128,25		
4 1 2 03 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	260.000.000,00	287.215.100,00	38.597.031,00	325.812.131,00	125,31		
4 1 2 03 03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	235.000.000,00	290.372.720,00	21.087.220,00	311.459.940,00	132,54		
4 1 2 03 04	Retribusi Izin Trayek	9.000.000,00	8.005.000,00	1.125.000,00	9.130.000,00	101,44		
4 1 3	Hasil Peng. Kekayaan Daerah Yg Diplahkan	23.417.592.834,00	23.417.592.834,00	1,00	23.417.592.834,00	100,00		
4 1 3 01	Bgn. Laba atas Peny. Modal Pd Peny. Mik Daerah	23.283.846.878,00	23.283.404.878,00	1,00	23.283.404.879,00	100,00		
4 1 3 01 01	Perusahaan Daerah	7.000.000,00	6.558.000,00	0,00	6.558.000,00	93,89		
4 1 3 01 02	Bank Negeri	23.276.846.878,00	23.276.846.878,00	1,00	23.276.846.879,00	100,00		
4 1 3 03	Bgn. Laba atas Peny. Modal pd Peny. Mik Swasta	133.745.956,00	133.745.956,00	0,00	133.745.956,00	100,00		
4 1 3 03 01	Bagian Laba Pada BPR	129.938.956,00	129.938.956,00	0,00	129.938.956,00	100,00		
4 1 3 03 02	BMT	3.807.000,00	3.807.000,00	0,00	3.807.000,00	100		
4 1 4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	50.005.408.502,00	46.160.166.862,89	9.075.168.102,00	55.235.334.964,89	110,46		
4 1 4 01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Diplahkan	32.200.000,00	72.875.000,00	14.335.000,00	87.210.000,00	270,22		
4 1 4 01 01	Penjualan Hasil Pemakan	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00		
4 1 4 01 05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00	100		
4 1 4 01 17	Penjualan Hasil Perikanan	0,00	40.175.000,00	0,00	40.175.000,00	100		
4 1 4 02	Penerimaan Jasa Giro	4.682.904.002,00	4.379.322.673,00	301.807.986,00	4.681.130.659,00	99,96		
4 1 4 02 01	Jasa Giro Kas Daerah	4.682.904.002,00	4.379.322.673,00	301.807.986,00	4.681.130.659,00	99,96		
4 1 4 03	Pendapatan Bunga Deposito	6.177.882.500,00	6.673.468.336,00	744.868.118,00	7.418.336.454,00	120,08		
4 1 4 03 01	Rekening Deposito Pada Bank Negeri	6.177.882.500,00	6.673.468.336,00	744.868.118,00	7.418.336.454,00	120,08		
4 1 4 13	Pendapatan dari Anggaran/Cicilan Rumah	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4 1 4 13 1	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Daerah Gedung III	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
4 1 4 15	Penerimaan Lain-Lain	39.112.422.000,00	35.034.700.853,89	8.014.156.998,00	43.048.857.851,89	110,06		
4 1 4 15 01	Denda	0,00	0,00	0,00	0,00	100		
4 1 4 15 01 01	-LHP/Giro	0,00	1.013.509.699,69	204.651.354,00	1.218.161.053,69	100		
4 1 4 15 01 02	-LHP	0,00	11.320.665,50	59.122.144,00	70.442.829,50	100		
4 1 4 15 01 03	Pengembalian 2013	0,00	564.198.200,56	109.883.727,00	674.081.927,56	100		
4 1 4 15 01 04	Penerimaan Lain-Lain	0,00	36,00	4.485.080,00	4.521.116,00	100		
4 1 4 15 01 05	Penerimaan Lain-Lain Disakan	0,00	437.613.446,63	30.729.101,00	468.342.546,63	100		
4 1 4 15 01 06	Penerimaan Lain-Lain Dirkas	0,00	361.732.200,00	12.500.000,00	374.232.200,00	100		
4 1 4 15 01 07	Penerimaan Lain-Lain Setda	0,00	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00	100		

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN APBD-P 2014	REALISASI PENERIMAAN		Jumlah	%	Ket
			NOVEMBER	DESEMBER			
1	2	3	4	5	6	7	8
4 1 4 15 03	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah	30.700.000.000,00	28.292.289.954,00	6.739.506.644,00	33.031.796.598,00	107,60	
4 1 4 15 04	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah	8.412.422.000,00	7.356.669.000,00	1.055.899.000,00	8.413.568.000,00	100,01	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN APBD-P 2014	REALISASI PENERIMAAN		Jumlah	%	Ket
			NOVEMBER	DESEMBER			
1	2	3	4	5	6	7	8
4 2 1 01	DANA PERMIBANGGAN	727.246.989.628,00	707.991.139.495,00	20.280.633.924,00	728.271.773.419,00	100,13	
4 2 1 01 01	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15.877.881.628,00	11.749.436.495,00	5.054.188.924,00	16.802.625.419,00	105,82	
4 2 1 01 01 01	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	13.027.383.928,00	9.749.382.087,00	4.899.920.508,00	14.649.312.575,00	112,03	
4 2 1 01 01 02	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH)-Pa 25 dan psl 29 NPDPDN dan PPH	6.579.380.974,00	5.696.393.615,00	2.569.219.504,00	8.272.613.119,00	120,27	
4 2 1 01 01 04	Bagi Hasil Cukai Tembakau	5.729.467.075,00	3.874.773.985,00	2.000.809.183,00	5.875.583.169,00	100	
4 2 1 02 01	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Dana Alam	2.995.488.092,00	1.989.054.428,00	1.588.258.416,00	2.157.312.844,00	76,90	
4 2 1 02 01 01	Bagi Hasil dari Iuran Izin Pemanfaatan Hutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 1 02 01 02	Bagi Hasil dari Provel Sumber Daya Alam Kehutanan	402.619.188,00	281.866.764,00	0,00	281.866.764,00	70,01	
4 2 1 02 01 03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	21.670.038,00	15.168.025,00	0,00	15.168.025,00	70,00	
4 2 1 02 01 04	Bagi Hasil dari Iuran Telep (Land Rent)	27.375.938,00	19.163.154,00	2.153.618,00	21.316.772,00	77,87	
4 2 1 02 05	Bagi Hasil dari Iuran Eksploitasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	1.928.119.748,00	1.384.864.281,00	47.634.928,00	1.432.499.207,00	74,30	
4 2 1 02 06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	402.414.488,00	281.690.139,00	101.482.271,00	383.182.410,00	95,22	
4 2 1 02 07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 1 02 08	Bagi Hasil dari Perimbangan Minyak Bumi	23.258.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 1 02 09	Bagi Hasil dari Perimbangan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 1 02 10	Bagi Hasil dari SDA Perimbangan Panas Bumi	0,00	16.281.065,00	6.977.801,00	23.258.866,00	100,00	
4 2 2 02 11	Bagi Hasil dan Iuran Kuasa Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 2 01	Dana Alokasi Umum	650.563.388.000,00	650.563.388.000,00	0,00	650.563.388.000,00	100,00	
4 2 3 01	Dana Alokasi Khusus	60.905.780.000,00	45.679.335.000,00	15.228.445.000,00	60.905.780.000,00	100,00	
4 2 3 01 01	- Dana Alokasi Khusus	60.905.780.000,00	45.679.335.000,00	15.228.445.000,00	60.905.780.000,00	100,00	
4 3 1 01	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAM	180.090.853.940,00	167.146.559.505,00	9.807.570.478,00	176.954.129.984,00	98,15	
4 3 1 01 01	Pendapatan Hibah	4.848.550.000,00	401.756.205,00	1.111.060.339,00	1.512.826.044,00	31,20	
4 3 1 01 01 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	4.839.550.000,00	318.202.605,00	1.111.060.339,00	1.429.263.444,00	31	
4 3 1 01 01 01 01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga	4.839.550.000,00	318.202.605,00	1.111.060.339,00	1.429.263.444,00	31	
4 3 1 01 01 01 01 01	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	210.000.000,00	83.562.600,00	0,00	83.562.600,00	39,79	
4 3 1 01 01 01 01 01 01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Properti dan Pemerintah Daerah Lainnya	31.155.335.940,00	25.502.926.301,00	5.632.509.639,00	31.155.335.940,00	100,00	
4 3 1 01 01 01 01 01 01 01	Dana Bagi Hasil Pajak Properti	31.155.335.940,00	25.502.926.301,00	5.632.509.639,00	31.155.335.940,00	100,00	
4 3 1 01 01 01 01 01 01 01 01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	7.240.540.669,00	6.916.545.209,00	2.629.682.449,00	9.546.237,00	100,00	
4 3 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.535.968.043,00	4.516.566.611,00	1.018.409.432,00	5.535.968.043,00	100,00	
4 3 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	11.616.596.135,00	9.613.548.054,00	2.002.988.071,00	11.616.596.135,00	100,00	
4 3 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	Bagi Hasil Dari Pajak Air Permulaan	77.696.531,00	104.619.817,00	-28.922.286,00	77.696.531,00	100,00	
4 3 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	6.695.196.562,00	5.348.157.600,00	1.337.038.962,00	6.695.196.562,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN APBD-P 2014	REALISASI PENERIMAAN		Jumlah	%	Ket
			NOVEMBER	DESEMBER			
1							
4 3 4 01	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	139.345.968.000,00	139.345.968.000,00	0,00	139.345.968.000,00	100	
4 3 4 01 01	Dana Penyesuaian	139.345.968.000,00	139.345.968.000,00	0,00	139.345.968.000,00	100	
4 3 4 01 02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah	888.000.000,00	888.000.000,00	0,00	888.000.000,00	100	
4 3 4 01 03	Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah	135.457.968.000,00	135.457.968.000,00	0,00	135.457.968.000,00	100	
4 3 4 01 06	Dana Insentif Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	100,00	
4 3 5 01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Penda Lain	4.740.000.000,00	1.896.000.000,00	2.844.000.000,00	4.740.000.000,00	100,00	
4 3 5 01 01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	4.740.000.000,00	1.896.000.000,00	2.844.000.000,00	4.740.000.000,00	100,00	
4 3 5 01 01	Bantuan Keuangan Dari Propinsi Sumber	4.740.000.000,00	1.896.000.000,00	2.844.000.000,00	4.740.000.000,00	100,00	
	TOTAL (1 + 2 *3)	1.004.776.570.838,00	983.148.861.995,69	41.626.543.549,00	1.004.776.405.244,69	100,00	



URUSAN PEMERINTAHAN : 2.01 PERIZINAN
 ORGANSIASI : 2.01.02 KANTOR PELAKSANA PELAYANAN TERPADU

4.1	Pendapatan Asli Daerah	700.000.000,00	1.405.499.247,00	29.982.786,00	1.435.482.027,00	205,07	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	700.000.000,00	1.405.499.247,00	29.982.786,00	1.435.482.027,00	205,07	
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	700.000.000,00	1.405.499.247,00	29.982.786,00	1.435.482.027,00	205,07	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	400.000.000,00	1.085.459.119,00	5.239.830,00	1.090.698.949,00	272,67	Perda Kab. Tanah Datar No. 14 Tahun 2011
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gunggahan/Keramaian	300.000.000,00	320.040.128,00	24.742.950,00	344.788.078,00	114,93	Perda Kab. Tanah Datar No. 13 Tahun 2011

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19. Urusan Wajib Kesehatan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 ORGANSIASI : 1.19.03 BAKYAT KEVANGUJANGAN BENCANA DAERAH

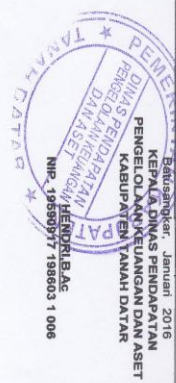
4.1	Pendapatan Asli Daerah	3.500.000,00	4.665.000,00	0,00	4.665.000,00	133,29	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.500.000,00	4.665.000,00	0,00	4.665.000,00	133,29	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	3.500.000,00	4.665.000,00	0,00	4.665.000,00	133,29	
4.1.2.01.08	Retribusi Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran	3.500.000,00	4.665.000,00	0,00	4.665.000,00	133,29	Perda Kab. Tanah Datar No. 12 Tahun 2011

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.17 KERIDAYAAN
 ORGANSIASI : 1.17.01 DINAS KERIDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

4.1	Pendapatan Asli Daerah	2.358.000.000,00	2.486.843.000,00	366.593.000,00	2.853.436.000,00	121,01	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.358.000.000,00	2.486.843.000,00	366.593.000,00	2.853.436.000,00	121,01	
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2.258.000.000,00	2.386.843.000,00	366.593.000,00	2.753.436.000,00	121,01	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Keayaan Daerah	223.000.000,00	190.023.000,00	22.650.000,00	212.673.000,00	94,57	Perda Kab. Tanah Datar No. 13 Tahun 2011
4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.135.000.000,00	2.296.818.000,00	343.943.000,00	2.640.761.000,00	123,81	Perda Kab. Tanah Datar No. 13 Tahun 2011

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH KEPEGAWAIAN
 ORGANSIASI : 1.20.03 SEKERTIARAT DAERAH

4.1	Pendapatan Asli Daerah	147.710.000,00	120.065.200,00	4.200.000,00	124.265.200,00	84,13	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	77.710.000,00	57.800.000,00	4.200.000,00	62.000.000,00	79,78	
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	77.710.000,00	57.800.000,00	4.200.000,00	62.000.000,00	79,78	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Keayaan Daerah (Bagi Umum)	77.710.000,00	57.800.000,00	4.200.000,00	62.000.000,00	79,78	Perda Kab. Tanah Datar No. 13 Tahun 2011
4.1.4	Latihan-Pelatihan Asat Daerah yang Saha (Bagi Umum)	70.000.000,00	62.265.200,00	0,00	62.265.200,00	88,95	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dijualkan	70.000.000,00	62.265.200,00	0,00	62.265.200,00	88,95	
4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	70.000.000,00	62.265.200,00	0,00	62.265.200,00	88,95	
JUMLAH PAD KESELURUHANNYA		104.674.778.235,00	103.182.844.356,89	8.389.882.191,00	112.072.726.547,89	107,07	

Batasniqker, Januari 2016
 KEPALA DINAS PENDAPATAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
 KABUPATEN TANAH DATAR

 NIP. 19560977 198603 1 006

4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.000.000,00	1.646.000,00	4.115.000,00	5.761.000,00	115,22	
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	5.000.000,00	1.646.000,00	4.115.000,00	5.761.000,00	115,22	Perdita Kab. Tanah Datar No. 13 Tahun 2011
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	21.308.915.850,00	21.311.850.250,00	0,00	21.311.850.250,00	100,01	
4.1.3.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	21.222.152.420,00	21.222.152.420,00	0,00	21.222.152.420,00	100,00	
4.1.3.01.01	Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.3.01.02	Bank Negara	21.222.152.420,00	21.222.152.420,00	0,00	21.222.152.420,00	100,00	Surat BN Sumbat Bk No.SR/160/BS-LUM/05-2014
4.1.3.03.02	Bagian Laba Atas penyertaan modal pada perusahaan milik Swasta	86.663.430,00	89.697.830,00	0,00	89.697.830,00	103,58	Hasil RUPRS
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.167.500.000,00	12.694.559.521,89	1.035.832.149,00	13.730.391.670,89	122,95	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	0,00	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00	100,00	
4.1.4.01.02	Penjualan Perantara/Perengkapan Kantor tidak terpakai	0,00	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00	100,00	
4.1.4.02	Penanaman Jasa Giro	5.105.000.000,00	6.506.099.984,00	306.228.441,00	6.812.328.425,00	133,44	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	5.105.000.000,00	6.506.099.984,00	306.228.441,00	6.812.328.425,00	133,44	Perjumlahan No.1/SRP/BTD-2014&No PKS/04/DIR/2014
4.1.4.03	Pendapatan Bunga Deposito	6.062.500.000,00	5.415.666.700,00	645.833.350,00	6.062.500.050,00	100,00	
4.1.4.03.01	Rekening Deposito pada Bank Negara	6.062.500.000,00	5.415.666.700,00	645.833.350,00	6.062.500.050,00	100,00	Perjumlahan No.1/SRP/BTD-2014&No PKS/04/DIR/2014
4.1.4.15	Penanaman Lain-lain	0,00	750.492.827,89	0,00	750.492.827,89	100,00	
	Denda	0,00	21.282.081,00	46.215.479,00	67.497.560,00	100,00	
	11/11/11	0,00	324.328.981,00	17.314.252,00	341.643.191,00	100,00	
	LHP/Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.4.15.01	Penanaman Lain-lain	0,00	404.681.865,00	20.240.629,00	424.922.494,00	100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Kantor Lingkungan Hidup

ORGANISASI : 1.02.02 Kantor Lingkungan Hidup

4.1	PENDAPATAN DAERAH	250.000.000,00	113.190.000,00	21.569.000,00	134.750.000,00	53,90	
4.1.2	Pendapatan Asli Daerah	250.000.000,00	113.190.000,00	21.569.000,00	134.750.000,00	53,90	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	250.000.000,00	113.190.000,00	21.569.000,00	134.750.000,00	53,90	
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Pemukiman/Kebersihan	250.000.000,00	113.190.000,00	21.569.000,00	134.750.000,00	53,90	Perdita Kab. Tanah Datar No. 12 Tahun 2011

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 KESERAHAN

ORGANISASI : 1.03.02 KEMAH SAKIT UMUM DAERAH

4.1	PENDAPATAN DAERAH	40.000.000,00	40.306.138.476,00	4.185.748.050,00	44.491.886.526,00	111,23	
4.1.4	Pendapatan Asli Daerah	40.000.000,00	40.306.138.476,00	4.185.748.050,00	44.491.886.526,00	111,23	
4.1.4.16	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	40.000.000,00	40.306.138.476,00	4.185.748.050,00	44.491.886.526,00	111,23	
4.1.4.16.01	Penanaman Lain-lain	40.000.000,00	40.306.138.476,00	4.185.748.050,00	44.491.886.526,00	111,23	Pertjng No.2 Tahun 2012

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.05 PETERNAKAN DAN PERIKANAN

ORGANISASI : 2.05 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

4.1	PENDAPATAN DAERAH	346.566.000,00	335.565.000,00	45.881.000,00	381.446.000,00	110,07	
4.1.2	Pendapatan Asli Daerah	346.566.000,00	335.565.000,00	45.881.000,00	381.446.000,00	110,07	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	224.650.000,00	181.988.000,00	13.744.000,00	195.732.000,00	87,13	Perdita Kab. Tanah Datar No. 12 Tahun 2011
4.1.2.02	Retribusi Pelayanan Pasar	224.650.000,00	181.988.000,00	13.744.000,00	195.732.000,00	87,13	Perdita Kab. Tanah Datar No. 12 Tahun 2011
4.1.2.02.07	Retribusi Jasa Usaha	121.920.000,00	94.489.000,00	9.120.000,00	103.609.000,00	84,97	Perdita Kab. Tanah Datar No. 13 Tahun 2011
4.1.4	Retribusi Rombak Pasang Hewan	0,00	55.097.000,00	22.017.000,00	77.114.000,00	100,00	
4.1.4.01	Penjualan Hasil Perikanan	0,00	55.097.000,00	22.017.000,00	77.114.000,00	100,00	
4.1.4.01.16	Penjualan Hasil Perikanan	0,00	55.097.000,00	22.017.000,00	77.114.000,00	100,00	
4.1.4.15	Penanaman Lain-lain	0,00	4.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
4.1.4.15.01	Penanaman Lain-lain	0,00	4.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	100,00	

DAFTAR : TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
DARI DINAS / INSTANSI TERKAIT TAHUN 2015
KEADAAN SAMPAI DENGAN DESEMBER 2015

URUSAN PEMERINTAH	KODE REKENING	URAIAN	APBD-P 2015		REALISASI PENERIMAAN		Jumlah	%	PENJELASAN
			NOVEMBER	DESEMBER	NOVEMBER	DESEMBER			
URUSAN PEMERINTAH : 1.02 PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET	1								
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2								
Pendapatan Asli Daerah	3		43.777.441.317,00	43.110.553.678,89	2.830.898.001,00	45.931.451.679,89	104,92		
Pajak Hotel	4.1.1.01		11.296.125.467,00	9.102.497.907,00	1.780.898.882,00	10.889.488.789,89	104,92		
Hotel Bintang Dua	4.1.1.01.05		192.794.784,00	96.459.275,00	43.714.300,00	140.173.575,00	72,71	Penda No 6 tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011	
Hotel Bintang Tiga	4.1.1.01.06		148.476.384,00	41.750.850,00	24.962.000,00	66.712.850,00	44,93	Penda No 6 tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011	
Hotel Bintang Empat	4.1.1.01.07		1.057.251.299,00	757.699.203,00	600.243.199,00	1.358.442.902,00	129,38	Penda No 6 tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011	
Restoran	4.1.1.02.01		1.050.000,00,00	86.760.000,00	15.916.339,00	85.79	Penda No 6 tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011		
Rumah Miskin	4.1.1.02.02		963.240.000,00	86.760.000,00	584.826.860,00	1.284.015.099,00	133,30	Penda No 6 tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011	
Pajak Hiburan	4.1.1.03		14.140.000,00	5.100.000,00	700.000,00	5.800.000,00	41,02		
Pesawat Kuda	4.1.1.03.13		8.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	50,00	Penda No 6 tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011	
Badag Kendaraan Bermotor	4.1.1.03.17		1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	50,00	Penda No 6 tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011	
Permainan Kelayangsan	4.1.1.03.14		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Penda No 6 tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011	
Mandi Ujung/Spa	4.1.1.03.15		1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Penda No 6 tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011	
Pusat Kebudayaan	4.1.1.03.18		1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Penda No 6 tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011	
Peraturan Olahraga	4.1.1.03.19		1.620.000,00	600.000,00	700.000,00	1.300.000,00	86,67	Penda No 6 tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011	
Pajak Pertambangan	4.1.1.04		128.130.565,00	99.645.242,00	30.582.122,00	131.227,00	104,43		
Reklame Papan/Bali Board/Videotron/Megatron	4.1.1.04.01		120.639.565,00	94.424.042,00	30.582.122,00	125.006.164,00	103,62	Penda No 6 tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011	
Reklame Kain	4.1.1.04.02		5.000.000,00	5.221.200,00	0,00	5.221.200,00	104,42	Penda No 6 tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011	
Reklame Melikah/Sthiker	4.1.1.04.03		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Penda No 6 tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011	
Reklame Selebaran	4.1.1.04.04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Penda No 6 tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011	
Reklame Bercorban	4.1.1.04.05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Penda No 6 tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011	
Pajak Penerangan Jalan PLN	4.1.1.05.01		1.000.000,00	5.877.265.090,00	526.399.422,00	6.403.664.512,00	102,95	Penda No 6 tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011	
Pajak Parkir	4.1.1.06.01		6.220.268.080,00	5.877.265.090,00	526.399.422,00	6.403.664.512,00	102,95	Penda No 6 tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011	
Pajak Air Tanah	4.1.1.09		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pajak Air Tanah	4.1.1.09.01		151.800.970,00	130.746.334,00	19.169.926,00	149.916.260,00	98,76	Penda No 6 tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011	
Pajak Air Tanah	4.1.1.09.02		131.800.970,00	107.686.334,00	19.169.926,00	127.856.260,00	98,76	Penda No 6 tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011	
Pajak Mineral Batuk Logan dan Batuan	4.1.1.09.03		590.980.000,00	344.770.427,00	273.958.149,00	618.728.576,00	112,40		
Manmor	4.1.1.09.06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pasir/Kerakl	4.1.1.09.07		212.500.000,00	147.440.976,00	195.794.408,00	343.235.384,00	161,52	Penda No 6 tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011	
Granti/Andus/Batu Beku	4.1.1.09.08		247.751.250,00	171.715.537,00	63.506.479,00	235.222.016,00	94,94	Penda No 6 tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011	
Tanah Liat	4.1.1.09.09		90.728.750,00	25.613.914,00	14.657.262,00	40.271.176,00	44,39	Penda No 6 tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011	
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan	4.1.1.10.01		2.233.005.068,00	948.518.293,00	276.185.734,00	1.224.702.027,00	54,85	Penda No 6 tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011	
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	4.1.1.10.02		2.233.005.068,00	948.518.293,00	276.185.734,00	1.224.702.027,00	54,85	Penda No 6 tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011	
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	4.1.1.11		280.000,00,00	842.425.543,00	2.800.000,00	3.642.425.543,00	133,87		
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	4.1.1.11.01		280.000,00,00	842.425.543,00	2.800.000,00	3.642.425.543,00	133,87	Penda No 6 tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011	

Realisasi Keuangan Tahun 2011

Dana yang disediakan dalam Kegiatan Penagihan PAD 2010 sebesar Rp 70.434.000.- (Tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).- dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

No	URAIAN	Pagu Dana	Realisasi	%	Sisa
1	Lembur	2.000.000.-	1.150.000	57	850.000
2	Belanja Jasa Service Kendaraan	129.725.-	129.000	93.47	725
3	Belanja Pengadaan Suku Cadang	750.000.-	750.000	100	-
4	Belanja BBM / Pelumas	2.650.000.-	1.921.000	72	729.000
5	Makan Minum	2.725.000	1.154.400	42	1.570.600
6	Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah	52.179.275.-	20.865.000	39	31.314.275
7	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000.-	8.150.000	81	1.850.000
	J U M L A H	70.434.000.-	34.119.400		36.314.600

Batusangkar, Februari 2016
An. Kasi Penagihan PAD



Gusti Wardani, SE
Nip.196708301991082001

Realisasi Keuangan Tahun 2012

Dana operasional yang dianggarkan dalam Kegiatan Penagihan PAD sebesar Rp 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah), dan telah terealisasi sebesar Rp. 71.503.600,- (51,07 %):

No	URAIAN	Pagu Dana	Realisasi	%	Sisa
1	Lembur	5.250.000	2.648.000	50.44	2.602.000
2	Makan Minum	5.575.000	250.800	4.50	5.324.200
3	Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah	88.871.000	30.866.000	34.73	58.055.000
4	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.304.000	34.731.600	86.17	5.572.400
	J U M L A H	140.000.000	68.496.400	48.90	71.503.600

Batusangkar, Februari 2016
An. Kasi Penagihan PAD



Gusri Wardani, SE
NIP. 196708301991082001

Realisasi Keuangan Tahun 2013.

Dana operasional yang dianggarkan dalam Kegiatan Penagihan PAD sebesar Rp 135.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 71.503.600,- (51,07 %):

No	URAIAN	Pagu Dana	Realisasi	Sisa	%
1	Lembur	1.740.000	1.032.000	708.000	59.31
2	Makan Minum Rapat	2.060.000	0	2.060.000	0
3	Makan Minum Kegiatan	1.650.000	0	1.650.000	0
4	Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah	90.000.000	36.792.000	53.208.000	40.88
5	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.550.000	34.315.000	5.234.700	86.76
	J U M L A H	135.000.000	72.139.300	62.860.700	53.44

Batusangkar, Februari 2016

An. Kasi Penagihan PAD



Gusti Wardani, SE

Np.196708301991082001

Realisasi Keuangan Tahun 2014.

Dana operasional yang dianggarkan dalam Kegiatan Penagihan PAD sebesar Rp 122.035.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 66.262.700,- (54,30 %):

No	URAIAN	Pagu Dana	Realisasi	Sisa	%
1	Lembur	10.980.000	7.680.000	3.300.000	69.95
2	Makan Minum Rapat	2.000.000	225.500	1.774.500	11.28
3	Makan Minum Kegiatan	1.375.000	1.371.700	3.300	99.76
4	Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah	63.280.000	43.850.000	19.430.000	69.30
5	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.400.000	13.135.000	31.264.500	29.58
	J U M L A H	122.035.000	66.262.700	55.772.300	54.30

Batusangkar, Februari 2016

An. Kasi Penagihan PAD



Gusti Wardani, SE

Nip. 196708301991082001

REALISASI KEUANGAN TAHUN 2015

Dana operasional yang dianggarkan dalam Kegiatan Penagihan PAD sebesar Rp 96.250.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah), dan telah terealisasi sebesar Rp. 56.827.300,- (59 %)

No	URAIAN	Pagu Dana	Realisasi	Sisa	%
1	Lembur	9.888.000	9.753.000	135.000	99%
2	Makan Minum	3.123.000	1.597.200	1.103.300	35%
3	Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah	45.560.000	28.630.000	16.930.000	63%
4	Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.556.000	16.237.700	18.318.300	47%
	JUMLAH	96.250.000	56.827.300	39.422.700	59%

Batusangkar, Februari 2016
An. Kasi Penagihan PAD



Gusri Wardani, SE
Nip.196708301991082001